



PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

**BerAKHLAK** **#bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG



**RENSTRA**  
RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2025 - 2029



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
18. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
  32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
  34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

#### Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

#### Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
  - a. Inspektorat;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Sekretariat DPRD;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Badan Pendapatan Daerah;
  - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
  - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
  - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
  - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
  - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - x. Dinas Perikanan;
  - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :

BAB.I	:	PENDAHULUAN
BAB.II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB.III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB.IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB.V	:	PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR ..415..



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Bengkayang, September 025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkulu Tengah



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Gambar Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	31
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	32
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah.....	32
2.2.2 Isu Strategis.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	43
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	43
3.2 Strategi Perangkat Daerah .....	49
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	52
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah .....	52
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	93
BAB V PENUTUP .....	97



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM berdasarkan Jabatan .....	16
Tabel 2.2	Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	16
Tabel 2.3	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana.....	18
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
Tabel 2.6	Kelompok Layanan Sasaran .....	29
Tabel 2.7	Mitra Perangkat Daerah.....	31
Tabel 2.8	Dukungan BUMD.....	31
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.....	34
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	37
Tabel 2.11	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi .....	39
Tabel 2.12	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW.....	40
Tabel 2.14	Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis .....	42
Tabel 3.1	Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	45
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	45



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Perangkat Daerah .....	13
Gambar 3.1	Logical Frame work .....	47
Gambar 3.2	Cascading Perangkat Daerah.....	48



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pedoman penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam



Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang Daerah Tingkat II Bengkayang (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan pembangunan Nasional;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
  21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;



22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus Tahun 2005 perihal petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
26. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan;
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan;
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas;
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.



## **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada Bab ini Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
  - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
  - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
  - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
  - 2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - 2.2.2 Isu Strategis.

## **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

## **BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan**

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

## **BAB V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan program dan anggaran;
- b) pengelolaan keuangan;
- c) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d) pengelolaan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- e) pembinaan, pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten;
- f) pembinaan dan pengkoordinasian urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten;
- g) pembinaan dan pengkoordinasian perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten;
- h) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang sumber daya air;
- j) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Bina Marga;
- k) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang Tata Ruang dan Cipta Karya;
- l) pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- m) pengendalian dan evaluasi program pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021



tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

#### **2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok memimpin, menyelenggarakan, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) dalam hal berhalangan maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### **2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang**

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas, Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
- b) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara dan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d) pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana



dimaksud Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- penyiapan bahan, penyusunan telaahan peraturan dan melaksanakan perundang-undangan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan rencana kerja dan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun pelaporan keadaan kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada sub bagian rencana kerja dan keuangan;
- pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan;
- pelaksanaan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- penyusunan laporan keuangan;
- verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;



- pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya serta melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten, Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Marga;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- c) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Marga;
- d) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di Bidang Bina Marga;
- e) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Marga;
- f) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Bina Marga;
- g) melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Bina Marga; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan pedoman, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dan pemeliharaan kegiatan dibidang Sumber Daya Air, Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;



- b) perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air;
- c) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Sumber Daya Air;
- d) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Sumber Daya Air;
- e) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Sumber Daya Air;
- f) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Sumber Daya Air;
- g) melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Sumber Daya Air; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang.**

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang tata ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Ruang;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang;
- c) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang;
- d) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Tata Ruang;
- e) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang;
- f) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Tata Ruang;
- g) melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Tata Ruang; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang air minum dan penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman, penataan bangunan dan



lingkungan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang cipta karya, Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Cipta Karya;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
- c) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya;
- d) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Cipta Karya;
- e) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya;
- f) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Cipta Karya;
- g) melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Cipta Karya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **2.1.1.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan, Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan



Fungsional sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

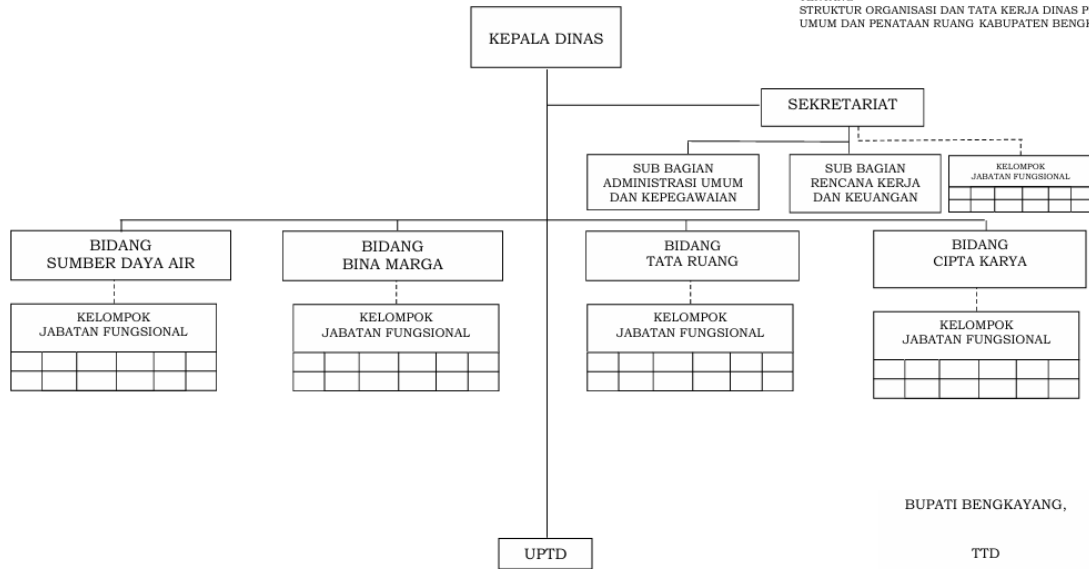
Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan penghasilan Penyetaraan Jabatan, dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

Gambar struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang, Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 91 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN  
 UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,  
 TTD  
 SEBASTIANUS DARWIS

**Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kabupaten Bengkayang**

**Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang-Bidang  
 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang**

No	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
1	Kepala Dinas	melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.	memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2	Sekretaris	memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.	a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran; b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara dan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara; d. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3.	Bidang Bina Marga	membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya serta	a. penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Marga; b. perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;



No	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
		melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"><li>c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Marga;</li><li>d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di Bidang Bina Marga;</li><li>e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Marga;</li><li>f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Bina Marga;</li><li>g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Bina Marga; dan</li><li>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li></ul>
4.	Bidang Sumber Daya Air	membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan pedoman, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dan pemeliharaan kegiatan dibidang Sumber Daya Air.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;</li><li>b. perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air;</li><li>c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Sumber Daya Air;</li><li>d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Sumber Daya Air;</li><li>e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Sumber Daya Air;</li><li>f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Sumber Daya Air;</li><li>g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Sumber Daya Air; dan</li><li>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li></ul>
5.	Bidang Tata Ruang	menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang tata ruang.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Ruang;</li><li>b. perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang;</li><li>c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang;</li><li>d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Tata Ruang;</li></ul>



No	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang;</li> <li>f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Tata Ruang;</li> <li>g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Tata Ruang; dan</li> <li>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>
6	Bidang Cipta karya	Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang air minum dan penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang cipta karya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Cipta Karya;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;</li> <li>c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya;</li> <li>d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Cipta Karya;</li> <li>e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya;</li> <li>f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Cipta Karya;</li> <li>g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Cipta Karya; dan</li> <li>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.



### 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sebanyak 49 Orang, Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan formal, serta pangkat dan golongan serta diklat penjenjangan (struktural), sebagai berikut :

#### **Latar Belakang Pendidikan formal Pegawai**

No	Latar belakang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	3
2	Strata 1	43
3	Diploma 3	14
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	22
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Total		84

Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang bahwa jumlah pegawai dengan kualifikasi Sarjana sebanyak 46 orang atau 54% dari jumlah pegawai.

#### **Golongan Kepangkatan**

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	52
3	Golongan II	28
Total		84

#### **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai**

No	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tk.II	-
2	Diklatpim Tk.III	2
3	Diklatpim Tk.IV	-
Total		1

#### **Jabatan Struktural**

No	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)
1	Eselon II B	1
2	Eselon IIIA	1
3	Eselon IIIB	4
4	Eselon IVA	2
5	Eselon IVB	-
Total		8

### 2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 1 Januari 2025 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, workshop, kendaraan dinas, kendaraan dinas operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis asset terlihat pada Tabel di bawah ini, Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Kondisi Inventaris Kendaraan Dinas/Operasional Dan Alat Alat Berat**

No	Item inventaris	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)	
			Baik	Rusak
1	Roda Dua	44	38	6
2	Roda Tiga	0	-	-
3	Roda Empat	5	4	1
4	Roda Enam	3	1	2
5	Tronton	1	-	1
6	Excavator	2	1	1
7	Bulldozer	1	1	-
8	Greder	1	1	-
9	Three wheel roller	1	1	-
10	Vibro roller	1	-	1
11	Beko loader	1	-	1
Total		60	51	9

**Kondisi Inventaris Bangunan dan Peralatan/perlengkapan kerja/kantor**

No	Item inventaris	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)	
			Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	2	2	-
2	Laboratorium / workshop	1	1	-
3	Peralatan kerja	519	473	46
Total		522	500	46

**2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang yang diatur dalam Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang maka kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabel yang telah ditetapkan sekaligus target kinerja pada periode sebelumnya (2021-2024) dengan menggunakan berbagai indikator serta melihat realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Adapun capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	55,7	56,4	58,04	59,6	53,44	58,75	37,17	31,65	0,96	1,04	0,64	0,53
		Persentase Tenaga Terampil yang Dilatih	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	95	N/A	N/A	N/A	1,36
2	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,00218	0,00227	0,00235	0,00248	N/A	0,60657859	0,08	0,0021	N/A	267,22	297,87	84,68
		Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	34,38	38,61	42,84	47,07	56,24	56,24	50,61	56,48	100	1,46	1,18	1,20
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Rumah tangga berakses air minum (%)	65,82	67,82	69,82	71,82	60,62	60,92	59,53	60,25	92,1	0,90	0,85	0,84
		Rumah tangga bersanitasi (%)	49,01	54,01	59,01	64,01	45,16	45,35	44,14	45,21	92,15	0,84	0,75	0,71
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	N/A	40	45	50	N/A	72,27	72,45	82,79	N/A	1,81	1,61	1,66
4	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rumah tangga pengguna listrik PLN	N/A	51,000	53,718	56,403	N/A	57,780	59,980	58,990	N/A	1,13	1,12	1,05
5	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (RTRW) (%)	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	1,00	1,00	1,00
		Rasio bangunan ber IMB per Satuan bangunan	N/A	N/A	N/A	11,5	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A	N/A	1,30
		Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	86,66	N/A	N/A	N/A	1,73
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset Pemerintah	Persentase Penatausahaan, Anggaran, Keuangan dan Aset OPD	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	96,64	N/A	N/A	N/A	0,97



Secara garis besar kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur dari 6 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja utama termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2022-2026 beserta dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Tahun 2024. Realisasi yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 telah mencerminkan target yang telah ditetapkan dalam PERJAKIN. secara rinci pengukuran tingkat capaian per sasaran strategis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. **Sasaran Strategis 1 “Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang”.**

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 yaitu tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang yang tercermin dengan capaian Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/sedang dan Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih, yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang tahun 2024 diukur dari persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi sedang terhadap total panjang jalan kabupaten, sedangkan Persentase Tenaga terampil konstruksi yang dilatih dihitung dari jumlah tenaga konstruksi yang dilatih dengan tenaga operator/teknis/analisis di Kabupaten Bengkayang. Untuk melihat kondisi jalan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dan tenaga terampil konstruksi.

Total Panjang jalan kabupaten sepanjang 823,088 km yang merupakan jumlah total dari kondisi jalan seluruhnya. Persentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang awal Tahun 2024 sebesar 30,13% atau menunjukkan bahwa keseluruhan jalan kabupaten mantap sepanjang 248,002 Km sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 170/DPUPR/TAHUN 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang tanggal 15 Februari 2023. Dari keseluruhan jalan kewenangan kabupaten sepanjang 823,088 Km. Sedangkan kondisi jalan tidak mantap sepanjang 575,086 Km. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang pada Tahun 2024 setelah seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dari anggaran sebesar Rp. 77.260.742.730 untuk menunjang Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp. 72.705.524.346 atau 94,10% terdapat realisasi target sebesar 31,65 dengan capaian 63,10.

b. **Sasaran Strategis 2 “Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya”.**



Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik diuraikan dengan mengukur Persentase rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan realisasi sebesar 0,0207 dari target 0,00248 menunjukkan terjadinya tidak ada peningkatan, dari luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi seluas 5458,9680 Ha pada tahun 2024. Dari keseluruhan jaringan irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi seluas 9664,7598 Ha. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik “sangat baik” dengan pencapaian indikator sasaran adalah 82%.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik mencapai realisasi 56,48% dari target 47,07%, menunjukkan terjadinya peningkatan dari luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik seluas 5458,97 Ha, dari total keseluruhan 9664,7598 Ha luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama persentase luas irigasi dalam kondisi baik “sangat baik” dengan pencapaian indikator sasaran sebesar 119,99%.

Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai realisasi 82,79% dari target 56%, dari Panjang jaringan drainase kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 505,85 KM, dari total keseluruhan 611,00 KM jaringan drainase kabupaten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat “sangat baik” dengan pencapaian indikator sasaran sebesar 147,84%.

c. Sasaran Strategis 3 ***“Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)”***.

Perbandingan antara target dan realisasi sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) untuk indikator kinerja Rumah tangga berakses air minum dan Rumah tangga bersanitasi diuraikan dengan Indikator Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2024 realisasinya sebesar 60,25%, realisasi ini masih dibawah target sebesar 71,82%. Realisasi 59,40 % bersumber dari persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan melalui SPAM jaringan Perpipaan. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama persentase rumah tangga berakses air minum dikategorikan “sangat baik” dengan pencapaian indikator sasaran adalah 82,71%.

Sedangkan indikator persentase rumah tangga bersanitasi tahun 2024 realisasinya sebesar 44,13%, dimana realisasi ini masih dibawah target 64,01%. Realisasi angka 44,13% bersumber dari Persentase jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi pada tahun eksisting terhadap total



proyeksirumah tangga pada tahun existing. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama persentase rumah tangga bersanitasi dikategorikan “baik” dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 68,94%.

- d. Sasaran Strategis 4 **“Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan”**.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 yaitu meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan yang tercermin dengan capaian indikator Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN.

- e. Sasaran Strategis 5 **“Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW”**.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 yaitu Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW yang tercermin dengan capaian indikator dari Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW), Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) dengan capaian kinerja 100%, realisasi ini sama dengan target pada tahun 2024. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama dikategorikan “Sangat baik” dengan pencapaian indikator sasaran adalah 100%.

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan , Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan kawasan/bangunan yang sesuai dengan peraturan perijinan adalah berhasil meningkatkan persentase bangunan yang ber-IMB dari yang ditargetkan 11,5% dengan mencapai realisasi 15%, untuk persentase bangunan yang ber-IMB per satuan Bangunan 130,43%.

Sedangkan Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang berfungsi baik (merupakan Indikator Kinerja Utama / IKU tambahan sesuai SK No 17 Tahun 2024) dengan target kinerja sebesar 50 %, realisasi kinerja 86,66%.

- f. Sasaran Strategis 6 **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah”**.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah yang tercermin dengan capaian indikator Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD, Untuk mewujudkan sasaran strategis 6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Asset Pemerintah dengan Indikator Kinerja utama Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD dengan target sebesar 100%, realisasi indikator kinerjanya sebesar 96,64%, dan dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kinerja utama



Persentase Penatausahaan Anggaran, Keuangan dan Asset OPD tidak mencapai target.

#### **2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran**

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

## INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
1	Tingkat Kemantapan jalan Kab/Kota	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$	260,545	X100	31,65	Bid. BM
			823,008			
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}} \times 100 \%$	283,74	X100	32,32	Bid. SDA
			877,93		0,32	
3	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (M)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS di WS Kewenangan Kabupaten (M)}} \times 100 \%$	7.238	X100	67,26	Bid. SDA
			10.762		0,67	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.}}{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.}} \times 100 \%$	52.316	X100	59,4	Bid. CK
			88.074			
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{umlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Bengkayang}} \times 100 \%$	38.886	X100	44,13	Bid. CK
			88.074			
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	$\frac{\text{umlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$	15	X100	1	Bid. CK
			15			
7	Rasio tenaga Operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis /analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analisis di wilayah Kabupaten}} \times 100 \%$	95	X100	135,71	Bid. CK
			70		1,36	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$	171	X100	100	Bid. CK
			171		1	
9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100 \%$	5.458,97	X100	56,48	Bid. SDA
			9.664,76		0,56	

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>BELANJA DAERAH</b>														
<b>Belanja Operasi</b>	<b>48.802.738.010</b>	<b>59.481.727.993</b>	<b>45.569.264.298</b>	<b>28.987.262.204</b>	<b>31.726.861.384</b>	<b>39.581.506.389</b>	<b>43.629.468.935</b>	<b>28.041.247.534</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>(0,57)</b>	<b>(0,36)</b>
- Belanja Pegawai	4.769.806.309	5.036.303.694	5.276.850.206	5.384.568.135	4.480.260.243	4.612.957.178	5.238.217.022	5.029.038.653	0,9	0,9	1,0	0,9	0,02	(0,04)
- Belanja Barang dan Jasa	44.032.931.701	54.445.424.299	40.292.414.092	23.602.694.069	27.246.601.141	34.968.549.211	38.391.251.913	23.012.208.881	0,6	0,6	1,0	1,0	(0,71)	(0,40)
<b>Belanja Modal</b>	<b>339.006.340.194</b>	<b>317.918.610.180</b>	<b>167.856.845.505</b>	<b>97.942.818.381</b>	<b>82.345.835.377</b>	<b>254.631.462.584</b>	<b>144.621.575.691</b>	<b>93.540.645.121</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>(0,71)</b>	<b>(0,35)</b>
- Belanja Modal Tanah	98.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.848.135.857	865.032.640	270.584.500	84.850.000	2.770.221.097	815.174.532	267.015.500	83.890.000	1,0	0,9	1,0	1,0	(2,19)	(0,69)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.910.469.000	19.690.121.321	15.597.810.000	5.917.288.000	3.851.912.680	19.603.573.081	14.007.513.810	5.916.289.000	0,8	1,0	0,9	1,0	(1,64)	(0,58)
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	331.149.735.337	297.363.456.219	151.988.451.005	91.940.680.381	75.723.701.600	234.212.714.971	130.347.046.381	87.540.466.121	0,2	0,8	0,9	1,0	(0,65)	(0,33)

Secara garis besar kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur dari 6 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja utama termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2022-2026 beserta dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Tahun 2024. Realisasi yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 telah mencerminkan target yang telah ditetapkan dalam PERJAKIN. Secara rinci pengukuran tingkat capaian per sasaran strategis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a) **Sasaran Strategis 1 “Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang”**

Indikator kinerja utama yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang tahun 2024 diukur dari persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Sedangkan Persentase Tenaga terampil konstruksi yang dilatih dihitung dari jumlah tenaga konstruksi yang dilatih dengan tenaga operator/teknis/analisis di Kabupaten Bengkayang dengan program pendukung antara lain :

- Program Penyelenggaraan Jalan memiliki anggaran sebesar Rp 77.260.742.730 dengan realisasi sebesar Rp. 72.705.524.346 atau 94,10%, menyisakan anggaran sebesar Rp 4.555.218.384 atau 5,90%. Berhasil mewujudkan pembangunan jalan sepanjang 130,292 KM, 28 unit jembatan, peningkatan jalan sepanjang 17,075 km dan 10 unit jembatan yang diganti/dilebarkan;
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.33.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.513.800,00 atau sebesar 90,30% dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.276.200,00 atau sebesar 9,70% berhasil melatih 95 orang tenaga operator/teknisi/analisis selama 2 gelombang pelatihan.

b) **Sasaran Strategis 2 “Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya”**

indikator kinerja utama yaitu rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, dengan dukungan program sebagai berikut :

- 1) Persentase rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan realisasi sebesar 0,0207 dari target 0,00248 menunjukkan terjadinya tidak ada peningkatan, dari luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi seluas 5458,9680 Ha pada tahun 2024. Dari keseluruhan jaringan irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi seluas 9664,7598 Ha. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama rasio jaringan irigasi dalam kondisi



- baik “**sangat baik**” dengan pencapaian indikator sasaran adalah 82%;
- 2) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik mencapai realisasi 56,48% dari target 47,07%, menunjukkan terjadinya peningkatan dari luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik seluas 5458,97 Ha, dari total keseluruhan 9664,7598 Ha luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama persentase luas irigasi dalam kondisi baik “**sangat baik**” dengan pencapaian indikator sasaran sebesar 119,99%.
  - 3) Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai realisasi 82,79% dari target 56%, dari Panjang jaringan drainase kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 505,85 KM, dari total keseluruhan 611,00 KM jaringan drainase kabupaten. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat “**sangat baik**” dengan pencapaian indikator sasaran sebesar 147,84%.

Penggunaan sumber dana untuk mendukung sasaran tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya dijelaskan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air anggaran sebesar Rp **5.600.616.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **5.546.566.300,00** atau 99,03%, menyisakan anggaran sebesar Rp 54.049.700,00 atau 0,97%;
  - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Kegiatan *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota* anggaran sebesar Rp **4.623.573.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **4.616.269.200,00** atau 99,84%, menyisakan anggaran sebesar Rp **7.303.800,00** atau 0,16%.
- c) **Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)”**

Indikator Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2024 realisasinya sebesar 60,25%, realisasi ini masih dibawah target sebesar 71,82%. Realisasi 59,40 % bersumber dari persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan melalui SPAM jaringan Perpipaan. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama persentase rumah tangga berakses air minum dikategorikan “**sangat baik**” dengan pencapaian indikator sasaran adalah 82,71%.

indikator persentase rumah tangga bersanitasi tahun 2024 realisasinya sebesar 44,13%, dimana realisasi ini masih dibawah target

64,01%. Realisasi angka 44,13% bersumber dari Persentase jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi pada tahun eksisting terhadap total proyeksi rumah tangga pada tahun eksisting. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama persentase rumah tangga bersanitasi dikategorikan **“baik”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 68,94%. Penggunaan sumber dana untuk mendukung sasaran Strategis Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah), dijelaskan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan program Indikator Kinerja Utama Rumahtangga berakses air minum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.330.079.450,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 15.101.306.700,00 atau sebesar 98,51%, yang menyisakan anggaran sebesar Rp. 228.772.750,00 atau sebesar 1,49%;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah Program Indikator Kinerja Utama Rumah Tangga Bersanitasi dengan pagu anggaran sebesar Rp **7.881.073.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **7.869.024.500,00** atau 99,85%, menyisakan anggaran sebesar Rp 12.048.500,00 atau 0,15%.

d) **Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi danketenagalistrikan”**

Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN Tahun 2024 realisasinya sebesar 58,99%, realisasi ini melampaui target sebesar 56,403%. Realisasi 58,99 % bersumber dari Persentase Jumlah Rumah Tangga pengguna listrik PLN. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah tangga pengguna listrik PLN dikategorikan **“Sangat Baik”** dengan pencapaian Indikator Sasaran adalah 105%. Sasaran strategis ini tidak ada Program yang mendukung pelaksanaannya karena tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

e) **Sasaran Strategis 5 “Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW”**

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) dengan capaian kinerja 100%, realisasi ini sama dengan target pada tahun 2024. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama dikategorikan **“Sangat baik”** dengan pencapaian indikator sasaran adalah 100%.

Penggunaan sumber dana untuk mendukung sasaran Strategis Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW, dijelaskan sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan program Indikator Kinerja Utama Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 570.000.000,00 realisasi

- anggaran sebesar Rp. 515.472.500,00 atau sebesar 90,43 %, yang menyisakan anggaran sebesar Rp. 54.527.500,00 atau sebesar 9,57%;
- Program Penataan Bangunan Gedung adalah Program Indikator Kinerja Utama Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan dan Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Berfungsi Baik dengan pagu anggaran sebesar Rp **7.696.495.050,00** dengan realisasi sebesar Rp. **7.663.997.905,00** atau 99,58%, menyisakan anggaran sebesar Rp 32.497.145,00 atau 0,42%.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Cipta Karya	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Masyarakat
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Masyarakat
2	Bidang Bina Marga	Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Masyarakat
3	Bidang Tata Ruang	Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Telaah Tata Ruang	Masyarakat
		Telaah Tata Ruang	Instansi Pemerintah/ Masyarakat
4	Bidang Sumber Daya Air	Rekomendasi Peil Banjir	

Jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Adapun Jenis Pelayanan Dasar Penerapan SPM pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan indicator :
  - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari);
  - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau);



- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari);
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau).

### **RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Km2)	Berakses Air Minum		Realisasi Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2023	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2023	Realisasi Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2024	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2024
						Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk					
1	Sungai Raya	23.520	7.314	75,85	310	3.170	10.778		3.170	50	3.220	44,03
2	Capkala	10.188	2.972	46,35	220	1.691	5.749		1.691		1.691	56,90
3	Sungai Raya Kepulauan	28.596	8.919	394	73	4.996	16.986		4.996		4.996	56,02
4	Samalantan	24.423	6.855	420,5	58	3.933	13.372	585	4.518	300	4.818	70,28
5	Monterado	34.658	9.883	291	119	5.625	19.125	250	5.875		5.875	59,45
6	Lembah Bawang	6.660	1.994	188	35	1.262	4.291		1.262		1.262	63,29
7	Bengkayang	34.605	9.642	157,04	220	7.840	26.656	300	8.140		8.140	84,42
8	Teriak	18.164	4.856	231,51	78	2.650	9.010		2.650		2.650	54,57
9	Sungai Betung	12.990	3.590	205,95	63	2.464	8.378	67	2.531		2.531	70,50
10	Ledo	15.748	4.583	481,75	33	2.468	8.391		2.468		2.468	53,85
11	Suti Semarang	6.224	1.738	280,84	22	909	3.091		909		909	52,30
12	Lumar	8.610	2.520	275,21	31	1.384	4.706		1.384		1.384	54,92
13	Sanggau Ledo	15.902	4.814	392,5	41	2.695	9.163		2.695	800	3.495	72,60
14	Tujuh Belas	15.497	4.938	221	70	3.275	11.135		3.275		3.275	66,32
15	Seluas	21.678	6.259	506,5	43	2.965	10.081		2.965		2.965	47,37
16	Jagoi Babang	9.988	2.967	655	15	1.550	5.270		1.550		1.550	52,24
17	Siding	8.515	2.350	563,3	15	706	2.400		706		706	30,04
		<b>295.966</b>	<b>86.194</b>	<b>5.386</b>	<b>1.447</b>	<b>49.583</b>	<b>168.582</b>	<b>1.202</b>	<b>50.785</b>	<b>1.150</b>	<b>51.935</b>	<b>60,25</b>

Indikator Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2024 realisasinya sebesar 60,25%, realisasi ini masih dibawah target sebesar 71,82%. Realisasi 60,25% bersumber dari persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan melalui SPAM jaringan Perpipaan. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama persentase rumah tangga berakses air minum dikategorikan **“sangat baik”** dengan pencapaian indikator sasaran adalah 87,77%.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap rumah tangga adalah :

$$\Sigma \text{komulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga} = 51.935$$

$$\Sigma \text{Jumlah total proyeksi rumah tangga pada tahun existing} = 86.194$$

$$= \frac{51.935}{86.194} \times 100\% = 60,25\%$$



Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 179.325.000,00 atau 99,64%
- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.101.306.700,00 atau 98,49%

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan indicator :

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik);
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk);
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan);
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik);
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan).

**RUMAH TANGGA BERAKSES SANITASI**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Km2)	Berakses SANITASI		Realisasi Rumah Tangga Berakses Sanitasi Tahun s/d 2023	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Tahun s/d 2023	Realisasi Rumah Tangga Berakses Sanitasi Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Tahun s/d 2024	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Tahun s/d 2024
						Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk					
1	Sungai Raya	23.520	7.314	75,85	310	3.113	10.584		3.113	60	3.173	43,38
2	Capkala	10.188	2.972	46,35	220	1.122	3.815		1.122		1.122	37,75
3	Sungai Raya Kepulauan	28.596	8.919	394	73	3.255	11.067	130	3.385	155	3.540	39,69
4	Samalantan	24.423	6.855	420,5	58	3.110	10.574	120	3.230		3.230	47,12
5	Monterado	34.658	9.883	291	119	3.865	13.141	339	4.204	310	4.514	45,67
6	Lembah Bawang	6.660	1.994	188	35	624	2.122		624		624	31,29
7	Bengkayang	34.605	9.642	157,04	220	7.172	24.385	50	7.222		7.222	74,90
8	Teriak	18.164	4.856	231,51	78	2.140	7.276		2.140	50	2.190	45,10
9	Sungai Betung	12.990	3.590	205,95	63	2.163	7.354	120	2.283		2.283	63,59
10	Ledo	15.748	4.583	481,75	33	2.486	8.452		2.486	55	2.541	55,44
11	Suti Semarang	6.224	1.738	280,84	22	426	1.448		426		426	24,51
12	Lumar	8.610	2.520	275,21	31	1.339	4.553	50	1.389		1.389	55,12
13	Sanggau Ledo	15.902	4.814	392,5	41	1.819	6.185	60	1.879		1.879	39,03
14	Tujuh Belas	15.497	4.938	221	70	1.980	6.732	95	2.075	50	2.125	43,03
15	Seluas	21.678	6.259	506,5	43	1.003	3.410		1.003	140	1.143	18,26
16	Jagoi Babang	9.988	2.967	655	15	1.096	3.726		1.096		1.096	36,94
17	Siding	8.515	2.350	563,3	15	469	1.595		469		469	19,96
		<b>295.966</b>	<b>86.194</b>	<b>5.386</b>	<b>1.447</b>	<b>37.182</b>	<b>126.419</b>	<b>964</b>	<b>38.146</b>	<b>820</b>	<b>38.966</b>	<b>45,21</b>



persentase rumah tangga bersanitasi tahun 2024 realisasinya sebesar 45,21%, dimana realisasi ini masih dibawah target 64,01%. Realisasi angka 45,21% bersumber dari Persentase jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi pada tahun eksisting terhadap total proyeksi rumah tangga pada tahun exsisting. Hal ini dapat disimpulkan capaian indikator kinerja utama persentase rumah tangga bersanitasi dikategorikan “**baik**” dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 68,94%.

Persentase rumah tangga bersanitasi adalah :

- Jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi = 38.966
  - Jumlah total proyeksi rumah tangga pada tahun exsisting = 86.194
- $$= \frac{38.966}{86.194} \times 100\% = 45,21\%$$

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.869.024.500 atau 99,85%;

### 3. Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Total Panjang jalan kabupaten sepanjang 823,088 km yang merupakan jumlah total dari kondisi jalan seluruhnya. Persentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang awal Tahun 2024 sebesar 30,13% atau menunjukkan bahwa keseluruhan jalan kabupaten mantap sepanjang 248,002 Km sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 170/DPUPR/TAHUN 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang tanggal 15 Februari 2023. Dari keseluruhan jalan kewenangan kabupaten sepanjang 823,088 Km. Sedangkan kondisi jalan tidak mantap sepanjang 575,086 Km. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang pada Tahun 2024 setelah seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dari anggaran sebesar Rp. 77.260.742.730 untuk menunjang Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp. 72.705.524.346 atau 94,10% terdapat realisasi target sebesar 31,65 dengan capaian 63,10.

#### ***Panjang peningkatan Jalan (Km) Tahun 2020-2024***

Jenis Permukaan Jalan <i>Type of Road Surface</i>	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspal/Paved	565,599	432,444	507,246	374,631	377,483
Kerikil/Gravel	436,904	633,592	573,878	255,687	252,835
Tanah/Soil	257,635	193,679	185,58	167,688	167,688
Lainnya/Others (Beton)	19,862	20,285	13,43	25,082	25,082
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>823,088</b>	<b>823,088</b>

### KONDISI RUAS JALAN

	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
2025	164,558	19,99	95,987	11,66	215,055	26,13	347,488	42,22
2024	152,015	18,47	95,987	11,66	216,221	26,27	358,865	43,60
SATUAN	km	%	km	%	km	%	km	%

#### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	MPP	Rekomendasi Tekhnis PBG	Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung
		Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Telaah Tata Ruang	PKKPR PKKPR-NB KRK Telaah Tata Ruang
2	PERKIMPLH	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana

#### 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antar unsur pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, baik melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, maupun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah dapat berupa kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Berikut ini adalah tabel yang memuat dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah:

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan
1	PDAM Tirta Bengkayang	Layanan Air Bersih
2		
3		
4		
5		

Air bersih merupakan kebutuhan hidup paling pokok bagi seluruh masyarakat. Penyedia kebutuhan air bersih Kabupaten Bengkayang adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Air bersih yang diproduksi oleh PDAM diharapkan dapat menjadi air baku yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum dan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pelanggan PDAM di Kabupaten Bengkayang sebagian besar berasal dari kelompok rumah tangga dan niaga kecil. Berdasarkan sebaran menurut Kecamatan, dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang, pada tahun 2023 terdapat hanya 6 Kecamatan yang dilayani atau disalurkan air bersih. Total air bersih yang disalurkan oleh PDAM Wilayah Bengkayang di seluruh Kecamatan sebesar 2,3 juta m<sup>3</sup> dengan nilai sekitar 6,7 miliar rupiah. Sedangkan pertumbuhan pelanggan air PDAM Kabupaten Bengkayang selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 21,29% dan pertumbuhan volume air PDAM yang disalurkan kepada pelanggan di Kabupaten Bengkayang selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 19,01%.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :

#### **a) Permasalahan di bidang Bina Marga**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Bina Marga, sebagai berikut :

1. Kondisi jalan tidak mantap (jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat) kabupaten Bengkayang sebesar 31,65% (260,50 Km);
2. Jembatan Kabupaten dengan kondisi tidak mantap (rusak sedang, rusak berat, jembatan kritis dan jembatan runtuh) sebesar 36,00% (310 jembatan);
3. Beberapa jalan poros kecamatan (Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota;
4. Beberapa jembatan pada jalan poros kecamatan ( Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten belum dalam kondisi baik/mantab;
5. kurangnya kualitas ruas jalan Kabupaten untuk penunjang kegiatan ekonomi, pariwisata, pertanian dan perkebunan;
6. Beberapa jembatan masih belum memenuhi standar jembatan layak dan aman (SNI);
7. Kurang tersedianya Data teknis data Base Jalan dan Jembatan Kabupaten.

#### **b) Permasalahan di bidang Cipta Karya**



Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Cipta Karya, sebagai berikut :

1. Belum terlindunginya Sumber air baku yang menjadi sumber SPAM;
2. Kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan SPAM;
3. Belum tersedianya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya ketersediaan Air Minum yang layak;
5. Masih terdapat 40,66% masyarakat kabupaten belum berakses air minum yang layak dan terlindungi;
6. Akses Sanitasi layak masyarakat masih 46% Masih terdapat 55,87 % Rumah Tangga yang belum mendapatkan Akses Sanitasi Layak/aman;
7. Belum tersedianya TPST Kabupaten;
8. Belum tersedianya Saprass Penunjang Persampahan;
9. Masih kurangnya proporsi PSU dengan luas kawasan permukiman perkotaan;
10. Masih banyaknya Bangunan Gedung dan Rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
11. Masih banyak Bangunan Gedung Pemerintah yang tidak layak fungsi.

**c) Permasalahan di bidang Sumber Daya Air**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Sumber Daya Air, sebagai berikut :

1. Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi;
2. Belum lengkapnya sistem jaringan irigasi;
3. Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi;
4. terbatasnya pengembangan lahan rawa sebagai lahan irigasi baru.
5. Penggunaan air irigasi cenderung boros dikarenakan masih rendahnya efisiensi masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
6. Menurunnya debit pada sumber-sumber air;
7. tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air;
8. Rendahnya kualitas air dikarenakan tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya;
9. Tingginya kebutuhan air baku akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktivitas manusia dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air;
10. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku;
11. Kerusakan daerah tangkapan air dan alih fungsi lahan yang cukup massive;
12. Perubahan Iklim;
13. Peningkatan erosi pada daerah hulu
14. buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai.

**d) Permasalahan di bidang Tata Ruang**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Sumber Daya Air, sebagai berikut :

1. Batas administrasi dan luas wilayah Kabupaten Bengkayang masih berdasarkan klaim sepihak, belum berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Berita Acara Kesepakatan Dengan Kabupaten Kota Berbatasan;
2. Belum adanya penegasan batas desa sehingga unit analisa luasan keruangan ditingkat desa kecamatan sulit dilakukan;
3. Belum menyesuaikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat;
4. Sektor pertanian belum memuat ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Dominasi pemanfaatan ruang untuk sektor perizinan perkebunan;
6. Kawasan Strategis Kabupaten, serta Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan wilayah belum ditetapkan secara definitif, dan belum menangkap peluang multiplier effect dari pembangunan PLBN Jagoi Babang dan Pelabuhan Internasional Kijing;
7. Sistem pusat-pusat permukiman belum terhirarki dengan baik, yang dapat mengakomodir pengembangan;
8. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang khususnya pada Kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagai rencana rinci yang mengatur peraturan zonasi dan instrument untuk perizinan tata ruang;

**Tabel. 2.2.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang kurang memadai.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Infrastruktur jalan yang kurang baik dan memadai;</li><li>2. Keterbatasan infrastruktur terutama kualitas jembatan yang memenuhi standar jembatan aman dan layak;</li><li>3. Pengembangan Jalan Baru dalam mengantisipasi tingginya volume kendaraan dan pertumbuhan penduduk.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi jalan tidak mantap (jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat) kabupaten Bengkayang sebesar 31,65% (260,50 Km);</li><li>2. Jembatan Kabupaten dengan kondisi tidak mantap (rusak sedang, rusak berat, jembatan kritis dan jembatan runtuh) sebesar 36,00% (310 jembatan);</li><li>3. Beberapa jalan poros kecamatan (Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota;</li><li>4. Beberapa jembatan pada jalan poros kecamatan ( Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten belum dalam kondisi baik/mantab;</li><li>5. kurangnya kualitas ruas jalan Kabupaten untuk penunjang kegiatan ekonomi, pariwisata, pertanian dan perkebunan;</li><li>6. Beberapa jembatan masih belum memenuhi standar jembatan layak dan aman (SNI);</li><li>7. Kurang tersedianya Data teknis data Base Jalan dan Jembatan Kabupaten.</li></ol>
2	Belum Optimal penyelenggaraan SPAM di Kabupaten dalam penyediaan air bersih.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi kinerja penyelenggaraan SPAM;</li><li>2. Membentuk kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum terlindunginya Sumber air baku yang menjadi sumber SPAM;</li><li>2. Kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan SPAM;</li><li>3. Belum tersedianya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten;</li></ol>



No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya ketersediaan Air Minum yang layak;</li> <li>5. Masih terdapat 40,66% masyarakat kabupaten belum berakses air minum yang layak dan terlindungi.</li> </ol>
3	Belum Optimal penyediaan Jaringan Sanitasi Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penyediaan Jaringan Sanitasi Masyarakat;</li> <li>2. Pembentukan kebijakan strategi pengembangan dan penyediaan jaringan sanitasi kabupaten;</li> <li>3. Optimalisasi Penataan Bangunan Lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses Sanitasi layak masyarakat masih 46% Masih terdapat 55,87 % Rumah Tangga yang belum mendapatkan Akses Sanitasi Layak/aman;</li> <li>2. Belum tersedianya TPST Kabupaten;</li> <li>3. Belum tersedianya Saprass Penunjang Persampahan;</li> <li>4. Masih kurangnya proporsi PSU dengan luas kawasan permukiman perkotaan;</li> <li>5. Masih banyaknya Bangunan Gedung dan Rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>6. Masih banyak Bangunan Gedung Pemerintah yang tidak layak fungsi.</li> </ol>
4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang yang belum Optimal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dinamika dan perubahan pada Perda Nomor 7 Tahun 2014;</li> <li>2. Proporsi pemanfaatan ruang untuk perkebunan yang terlalu besar;</li> <li>3. Luasan RTH Kabupaten yang belum memenuhi angka 35%;</li> <li>4. Optimalisasi penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas administrasi dan luas wilayah Kabupaten Bengkayang masih berdasarkan klaim sepihak, belum berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Berita Acara Kesepakatan Dengan Kabupaten Kota Berbatasan;</li> <li>2. Belum adanya penegasan batas desa sehingga unit analisa luasan keruangan ditingkat desa kecamatan sulit dilakukan;</li> <li>3. Belum menyesuaikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat;</li> <li>4. Sektor pertanian belum memuat ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> <li>5. Dominasi pemanfaatan ruang untuk sektor perizinan perkebunan;</li> <li>6. Kawasan Strategis Kabupaten, serta Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan wilayah belum ditetapkan secara defenitif, dan belum menangkap peluang multiplier effect dari pembangunan PLBN Jagoi Babang dan Pelabuhan Internasional Kijing;</li> <li>7. Sistem pusat-pusat permukiman belum terhirarki dengan baik, yang dapat mengakomodir pengembangan;</li> <li>8. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang khususnya pada Kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagai rencana rinci yang mengatur peraturan zonasi dan instrument untuk perizinan tata ruang;</li> <li>9. Ketentuan umum dan peraturan zonasi belum memuat ketentuan yang lebih rinci sebagai instrumen untuk pengendalian pemanfaatan ruang.</li> </ol>
5	Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Jaringan Irigasi</li> <li>2. Banjir dan Kekeringan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi;</li> <li>2. Belum lengkapnya sistem jaringan irigasi;</li> <li>3. Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi;</li> <li>4. terbatasnya pengembangan lahan rawa sebagai lahan irigasi baru.</li> </ol>
6	Rendahnya ketersediaan Air Baku	Optimalisasi Layanan Air Baku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan air irigasi cenderung boros dikarenakan masih rendahnya efisiensi masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;</li> <li>2. Menurunnya debit pada sumber-sumber air;</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			3. tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air; 4. Rendahnya kualitas air dikarenakan tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya; 5. Tingginya kebutuhan air baku akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktivitas manusia dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air; 6. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku; 7. Kerusakakan daerah tangkapan air dan alih fungsi lahan yang cukup massive; 8. Perubahan Iklim; 9. Peningkatan erosi pada daerah hulu 10. buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai.

## 2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

### 2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan perkembangan informasi dan pemenuhan dasar kebutuhan di masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bengkayang merupakan bagian Organisasi Perangkat Daerah yang terus menerus akan memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka perlu menentukan isu-isu strategis, yaitu :

- a) Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan dalam rangka mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah dan mobilitas ekonomi masyarakat;
- b) Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah;



- c) Terbatasnya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d) Penyediaan infrastruktur dasar berupa air minum dan sanitasi yang layak masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi
- e) Peningkatan pelayanan air bersih masih rendah;
- f) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), peningkatan cakupan layanan sanitasi, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- g) Kondisi drainase yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir;
- h) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa belum optimal;
- i) Optimalisasi pengelolaan sistem irigasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir untuk mendukung ketahanan pangan dan mitigasi bencana;
- j) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dan Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan wilayah belum dilakukan secara definitif;
- k) Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, serta belum tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di kawasan perkotaan, bantaran sungai, dan permukiman penduduk.

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
<b>Meningkatkan kapasitas tampungan air (target 200 m<sup>3</sup>/kapita/tahun)</b>	Minimnya pembangunan bendungan/embung di daerah rawan kekeringan	Dukungan program nasional ketahanan air dan irigasi	Anggaran daerah terbatas, topografi sulit
<b>Meningkatkan efisiensi irigasi (target efisiensi 0,80 USD/m<sup>3</sup>)</b>	Saluran irigasi rusak dan tidak terpelihara dengan baik	Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Kurangnya SDM teknis dan minim pemeliharaan
<b>Meningkatkan akses sanitasi aman (target 70%)</b>	Masih banyak masyarakat menggunakan sanitasi terbuka, minim IPAL	Dukungan program SANIMAS dan DAK sanitasi	Keterbatasan lahan dan kesadaran masyarakat
<b>Meningkatkan akses air minum perpipaan (target 100% perkotaan)</b>	Cakupan layanan PDAM rendah, pipa distribusi banyak yang bocor	Adanya program SPAM Regional dan Hibah Air Minum	Keterbatasan PDAM dalam investasi dan kapasitas layanan
<b>Menurunkan waktu tempuh jalan (target 1,25 jam/100 km)</b>	Banyak jalan kabupaten dalam kondisi rusak dan belum terhubung	Program infrastruktur konektivitas (DAK Fisik Jalan, Inpres Jalan Daerah)	Keterbatasan alat berat dan tenaga kerja di daerah
<b>Meningkatkan pengelolaan sampah (target 90% terolah)</b>	Kurangnya TPA yang memenuhi standar dan terbatasnya pengangkutan	Program TPS 3R dan DAK Persampahan	Biaya operasional tinggi, partisipasi masyarakat rendah

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Sasaran tersebut diarahkan untuk mendorong efisiensi pembangunan infrastruktur,



pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.

Namun, dalam implementasinya di tingkat daerah, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi perangkat daerah yang berpotensi menghambat pencapaian target nasional. Misalnya, dalam upaya meningkatkan kapasitas tampungan air dan efisiensi jaringan irigasi, banyak daerah masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya tenaga teknis, serta kondisi geografis yang menyulitkan pembangunan infrastruktur air. Demikian pula dalam peningkatan akses sanitasi dan air minum perpipaan, keterbatasan kapasitas lembaga layanan seperti PDAM serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan yang signifikan.

Meskipun demikian, terdapat pula berbagai faktor pendukung yang dapat mendorong percepatan pencapaian sasaran Renstra PUPR di daerah. Dukungan program-program nasional seperti pembangunan SPAM regional, rehabilitasi jaringan irigasi, DAK infrastruktur dasar, serta Inpres Jalan Daerah menjadi peluang bagi daerah untuk mempercepat pembangunan. Di samping itu, adanya kerangka kebijakan nasional yang terukur dan indikator yang jelas memberikan arah pembangunan yang terintegrasi dan fokus.

Sementara itu, faktor penghambat yang umum ditemui antara lain adalah keterbatasan fiskal daerah, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan peralatan teknis, serta masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan. Kesenjangan pembangunan antar wilayah juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di daerah terpencil dan tertinggal yang membutuhkan intervensi lebih intensif.

Dengan demikian, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk sinergi perencanaan, dukungan teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Peran serta masyarakat dan sektor swasta juga perlu dioptimalkan guna memastikan bahwa pelaksanaan Renstra PUPR 2025–2029 dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

#### **2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi**

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintas wilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Telaah terhadap Renstra Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Beberapa

permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam mencapai sasaran Renstra PUPR di Kalimantan Barat antara lain :

1. **Keterbatasan Infrastruktur Dasar:** Banyak wilayah, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman, masih kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem penyediaan air minum;
2. **Kerusakan Infrastruktur Eksisting:** Infrastruktur yang ada sering kali mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan, yang memerlukan biaya besar untuk rehabilitasi dan pemeliharaan.
3. **Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:** Anggaran daerah yang terbatas menjadi kendala dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur besar, serta kurangnya tenaga teknis yang kompeten di tingkat daerah.
4. **Koordinasi Antar Daerah yang Lemah:** Kurangnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, yang dapat menyebabkan tumpang tindih atau ketidaksesuaian prioritas pembangunan.

**Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan pemerataan pembangunan dan kualitas infrastruktur yang adil dan berkelanjutan.	<b>Keterbatasan Infrastruktur Dasar:</b> Banyak wilayah, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman, masih kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem penyediaan air minum;	<b>Kebijakan Pemerintah yang Mendukung:</b> Adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mendukung pembangunan infrastruktur di daerah, seperti alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat.	<b>Bencana Alam yang Sering Terjadi:</b> Kalimantan Barat rawan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan, yang dapat merusak infrastruktur dan mengalihkan fokus pembangunan.
	<b>Kerusakan Infrastruktur Eksisting:</b> Infrastruktur yang ada sering kali mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan, yang memerlukan biaya besar untuk rehabilitasi dan pemeliharaan.	<b>Potensi Sumber Daya Alam:</b> Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit, karet, dan perikanan, yang dapat menjadi basis ekonomi untuk mendukung pembangunan infrastruktur.	<b>Keterbatasan Infrastruktur Pendukung:</b> Kurangnya infrastruktur pendukung seperti jaringan komunikasi dan transportasi yang memadai dapat menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur.
	<b>Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:</b> Anggaran daerah yang terbatas menjadi kendala dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur besar, serta kurangnya tenaga teknis yang kompeten di tingkat daerah.	<b>Dukungan Masyarakat dan Swasta:</b> Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dapat mempercepat pencapaian sasaran.	<b>Tantangan Geografis:</b> Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, dan perbatasan internasional memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
	<b>Koordinasi Antar Daerah yang Lemah:</b> Kurangnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, yang dapat menyebabkan tumpang		

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	tindih atau ketidaksesuaian prioritas pembangunan.		

### 2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah namun demikian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Bidang Pekerjaan Umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditinjau dari implikasi RTRW mengingat **RTRW Kalbar 2025-2044/2045** dalam tahap akhir penyusunan, belum resmi disahkan dan masih memerlukan finalisasi teknis/substansi. dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari implikasi RTRW**

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	<b>Pengembangan jaringan jalan strategis provinsi dan jalan penghubung kawasan</b> (mengacu struktur ruang RTRW Kalbar 2024-2043)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pembangunan infrastruktur nasional (RPJMN)</li> <li>- Konektivitas antardaerah diperkuat</li> <li>- Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran daerah</li> <li>- Lahan/tanah belum bebas</li> <li>- Masih terdapat tumpang tindih dengan kawasan lindung</li> </ul>
2	<b>Pembangunan dan pengelolaan sistem drainase, irigasi, dan pengendalian banjir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTRW mendukung pengendalian ruang di kawasan rawan banjir</li> <li>- Tersedianya peta rawan bencana</li> <li>- Dukungan program PISEW dan irigasi dari Kementerian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya data teknis detail lokasi</li> <li>- Pemeliharaan belum optimal</li> <li>- Alih fungsi lahan memperparah banjir</li> </ul>
3	<b>Pengelolaan air bersih dan sanitasi permukiman (SPAM dan SPAL)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah RTRW mendukung pengembangan permukiman layak</li> <li>- Adanya program nasional (NSUP, KOTAKU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan SDM teknis di daerah</li> <li>- Lokasi permukiman informal sulit dijangkau</li> </ul>
4	<b>Pengembangan infrastruktur perbatasan dan kawasan strategis nasional (KSN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercantum dalam RTRW: PLBN Entikong, Kijing, Badau</li> <li>- Prioritas nasional dan dukungan pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketergantungan pada koordinasi lintas kementerian</li> <li>- Konflik pemanfaatan ruang perbatasan dengan sektor kehutanan</li> </ul>
5	<b>Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (pengawasan bangunan dan infrastruktur)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTRW menjadi acuan zonasi dan izin bangunan</li> <li>- Ketersediaan SIMTARUNG (webGIS spasial)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya pengawasan lapangan</li> <li>- Lemahnya sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang</li> </ul>
6	<b>Penyusunan perencanaan teknis pembangunan prasarana wilayah</b> (jalan, jembatan, drainase, fasilitas umum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah RTRW sudah menetapkan zona pengembangan</li> <li>- Terintegrasi dengan RPJMD dan Renstra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih belum lengkapnya data spasial teknis</li> <li>- Ketidaksinkronan RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota</li> </ul>



#### **2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

1. Mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia kesehatan dan Pendanaan yang menghambat implementasi program sanitasi secara efektif dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dan Memetakan potensi sumber air bersih;
2. Mengatasi keterbatasan akses air bersih yang berpengaruh pada kebiasaan sanitasi masyarakat dengan membangun/memperbaiki sarana sanitasi terutama Toilet untuk mencapai kondisi.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

**Tabel 2.14 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jaringan jalan kabupaten penghubung pusat ekonomi dan perbatasan	Banyak jalan kabupaten rusak atau belum terhubung	Pembangunan jalan penghubung antar Kecamatan di wilayah terpencil	Kenaikan curah hujan memperparah kerusakan jalan	Adaptasi perubahan iklim pada infrastruktur	Penguatan konektivitas wilayah dan kawasan strategis nasional	Konektivitas wilayah antar kecamatan belum merata
Potensi sumber air permukaan dan air tanah untuk SPAM	Akses air bersih belum merata dan kualitas air menurun	Sumber air tercemar akibat limbah PETI domestik dan industri	Ketersediaan air menurun saat musim kemarau ekstrem	Akses air bersih sebagai bagian dari SDG's 6 (Clean Water)	Program 100-0-100 (air, sanitasi, permukiman)	Kesenjangan layanan SPAM antara kota dan pedesaan Kabupaten Bengkayang
Kawasan pengembangan perbatasan dan pelabuhan	Infrastruktur penunjang kawasan belum lengkap	Rencana pembangunan belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan	Urbanisasi kawasan perbatasan menyebabkan degradasi lahan	Transformasi wilayah perbatasan menjadi pintu ekspor	KSN/KSPI masuk RPJMN dan PSN	Keterbatasan kapasitas infrastruktur dasar di kawasan perbatasan
Potensi kawasan pertanian dan irigasi teknis	Irigasi tidak optimal, banyak jaringan rusak teknis	Pembangunan jaringan irigasi tanpa analisis konservasi DAS	Banjir dan kekeringan memengaruhi pola tanam	Ketahanan pangan menghadapi perubahan iklim	Kedaulatan pangan nasional berbasis infrastruktur	Rehabilitasi jaringan irigasi di daerah sentra padi Kabupaten Bengkayang
Ketersediaan ruang untuk pembangunan infrastruktur hijau	Infrastruktur masih berbasis beton, belum ramah lingkungan	Kurangnya penerapan prinsip green infrastructure	Penurunan suhu mikroklimat perkotaan peningkatan emisi	Pembangunan berkelanjutan & rendah karbon (SDGs, Paris Agreement)	Agenda Nasional: pembangunan hijau & net zero emission 2060	Butuh RTH dan pembangunan infrastruktur di Kawasan perkotaan

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Bengkulu mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Bengkulu yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029, yaitu:

**“ KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI,  
SEJAHTERA, dan BERKELANJUTAN ”**

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkulu.

Sedangkan Misi Kabupaten Bengkulu dalam mendukung visi tersebut antara lain:

**Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.**

Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkulu. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

**Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

**Misi 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur.**

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Misi 4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif.**

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.



**Misi 5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.**

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 3 Tujuan ke 1 dan Sasaran 1 dan 3 dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

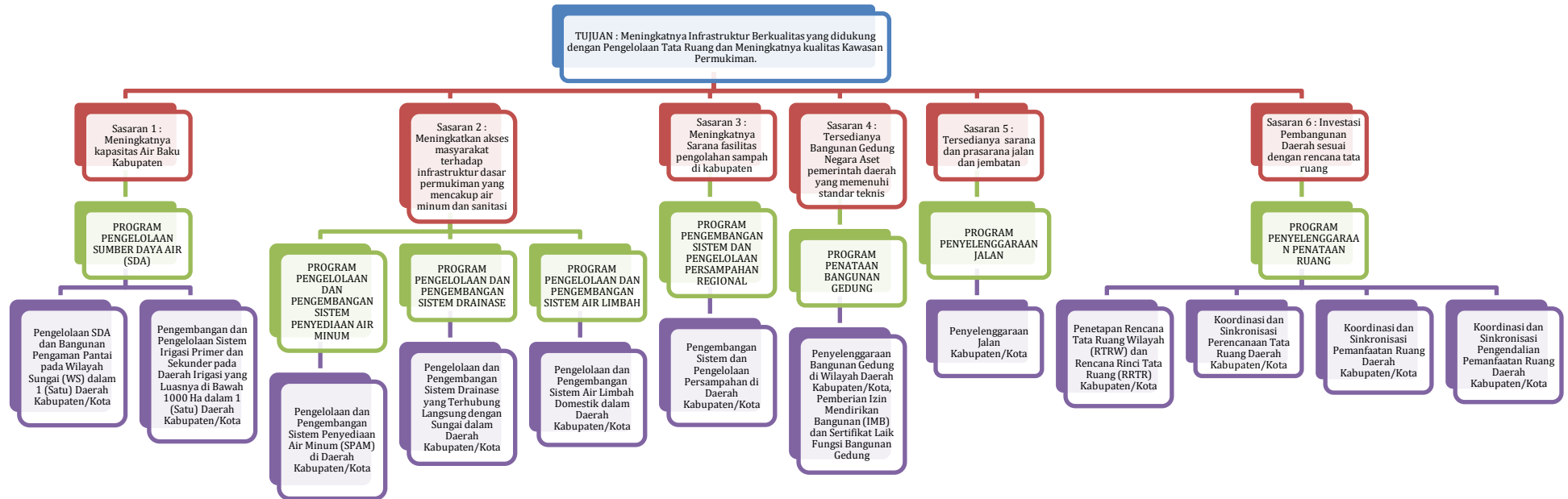
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										
Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang	Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang dan Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman		Indeks Infrastruktur (Angka)	56,73	58,66	59,26	59,93	60,65	61,44	62,28
			Ketaatan Terhadap RTRW (%)	84,09	90	100	100	100	100	100
			Timbulan Sampah yang ditangani (%)	14,9	15	18	23	30	38	45
		Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	1729,5	1744,5	1759,5	1774,5	1789,5	1804,5	1819,5
			Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	0,21	0,83	2,03	2,41	2,79	3,17	3,53
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	82,79	83,69	84,59	85,49	86,39	87,29	88,19
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	2	3	3	3	4	4	4
		Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	86,66	95,33	100	100	100	100	100
		Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang (%)	90	90	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	31,65	31,65	32,65	33,65	34,65	35,65	36,65
		Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi Bersertifikat (Orang)	90	95	97	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat Nilai Sakip (Kategori)	B	B	B	B	B	B	B

## KERANGKA LOGIS / LOGICAL FRAME WORK



Gambar 3.1 *Logical Framework*

## CASCADING



**Gambar 3.1 Cascading Perangkat Daerah**



### 3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkahlangkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang	1 Meningkatkan kapasitas Air Baku Kabupaten	1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber Air Baku Kabupaten	1 Peningkatan Kualitas Layanan Air Baku;
		2 Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	2 Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah aliran sungai (DAS) atau drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim;
	3 Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM		3 Percepatan Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi Primer dan Sekunder secara Partisipatif;
		2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	4 Penambahan air irigasi sesuai potensi pemanfaatan sumber daya alam daerah;
	4 Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat		5 Peningkatan Kualitas Layanan dan Distribusi Air Minum Kepada Masyarakat;
		5 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai	6 Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan;
	6 Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang beroperasi		7 Perluasan jaringan PDAM ke seluruh pelosok antara lain melalui pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM) baru;
		3 Meningkatkan Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	7 Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung demi kelayakan bangunan
	9 Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/ peningkatan IPAL sistem setempat;		
			10 Percepatan pembangunan dan pengelolaan drainase perkotaan yang maksimal;
			11 Pengembangan dan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bengkulu Tengah;
			12 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
			13 Optimalisasi Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Pemerintah untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			14 Peningkatan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan Gedung dengan lingkungannya;
	4 Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	8 Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, trotoar, drainase Pendukung Jalan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan	15 Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan, Jembatan, drainase tepi jalan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan;
	5 Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	9 Melakukan pendataan terhadap tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat	16 Melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan kepada Tenaga ahli Konstruksi Kualifikasi;
	6 Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	10 Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang	17 Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang serta meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang;
			18 Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik;
	7 Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur	11 Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	19 Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan penyediaan sarana dan prasarana dalam urusan kepegawaian;
8 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 Memaksimalkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku	20 Melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	

### 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

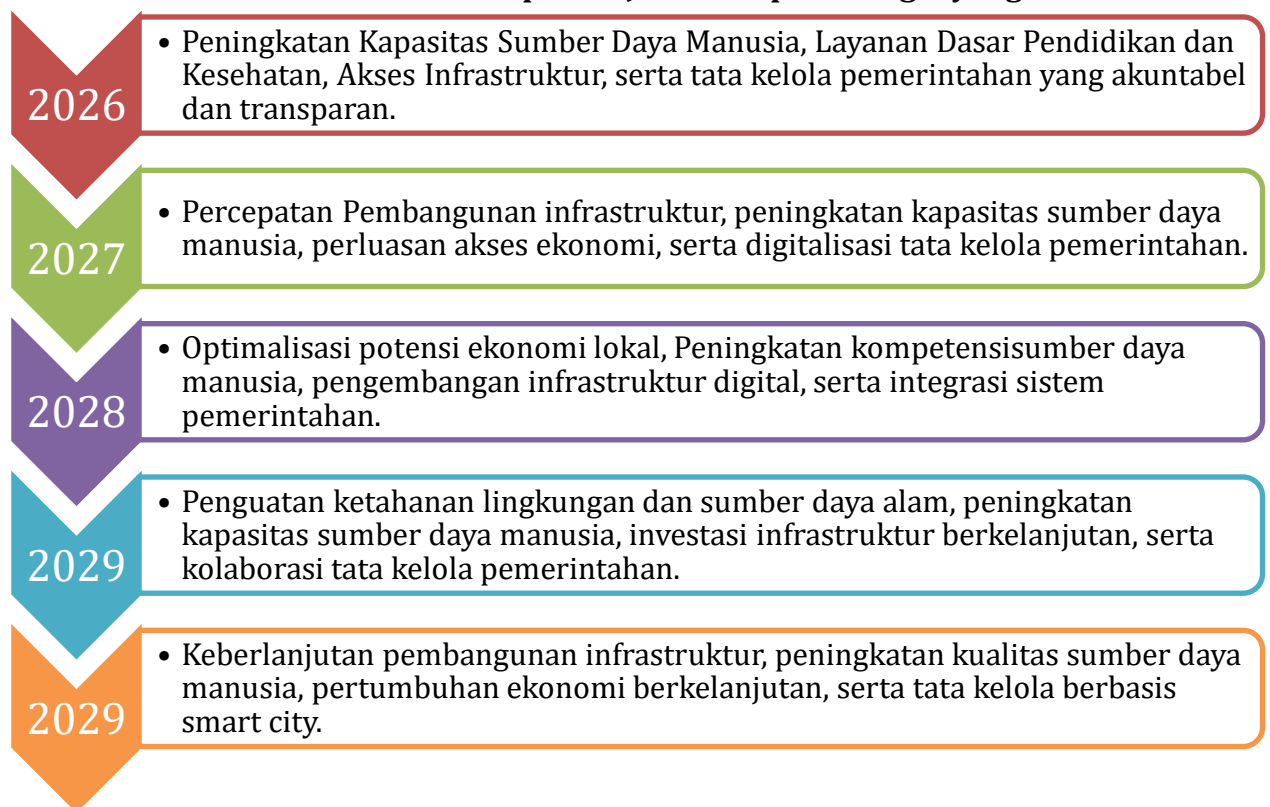
Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah.



**Tabel 3.XX Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemenuhan standar pelayanan minimal infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah	Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan strategis Kabupaten	
2	Penerapan ketentuan teknis pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan air	Ketahanan pangan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian	Penguatan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi dan pengaman sungai	
3	Standarisasi tata ruang dan pemanfaatan ruang (RTRW & RDTR)	Penataan ruang wilayah berkelanjutan	Penataan dan pengendalian ruang yang terintegrasi dengan RTRW dan RPJMD	Penyusunan dan penyesuaian RTRW dan RDTR kabupaten/kota se-Kalimantan Barat	
4	Pemenuhan prasarana sanitasi dan air minum berbasis SPM	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses air bersih dan sanitasi	Penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) regional dan prasarana sanitasi terpadu	Pembangunan IPA, IPAL, dan jaringan distribusi air bersih	

**Tabel 3.XX Pentahapan RPJMD Kabupaten Berau**





## **Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang**

### **A. Persiapan Penyusunan Renstra**

- 1 Pembentukan tim penyusun Renstra;
- 2 Penelaahan terhadap dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti:
  - RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
  - RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
  - Kebijakan strategis nasional dan provinsi.
- 3 Identifikasi regulasi dan peraturan teknis terkait sektor pekerjaan umum.

### **B. Perumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

- 1 Kajian terhadap isu strategis sektor pekerjaan umum (infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi, drainase, dll);
- 2 Penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- 3 Identifikasi permasalahan dan tantangan pembangunan infrastruktur.

### **C. Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

- 1 Menyusun **tujuan dan sasaran** Dinas PU;
- 2 Menentukan **indikator kinerja** sasaran;
- 3 Menetapkan **strategi dan arah kebijakan** pembangunan infrastruktur untuk 5 tahun ke depan.

### **D. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan**

- 1 Menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran;
- 2 Penentuan **indikator kinerja program/kegiatan**, target, dan pagu indikatif;
- 3 Sinkronisasi dengan Renstra perangkat daerah lain yang terkait (misalnya : Dinas Perkim LH, Bapperida, dll).

### **E. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra**

- 1 Konsultasi publik atau forum perangkat daerah untuk memperoleh masukan;
- 2 Penyelarasan dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 3 Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya.

### **F. Penetapan Renstra**

- 1 Renstra ditetapkan melalui **Peraturan Kepala Dinas** atau **dokumen resmi** sesuai ketentuan;
- 2 Digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah**

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang. sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang :

**Tabel 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					67.837.951.642,00		71.554.657.841,00		85.565.598.770,00		96.656.564.885,00		101.717.426.209,00
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.846.707.000,00		7.964.407.605,00		7.944.051.681,00		8.024.492.197,00		8.205.737.119,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	63,35	63,85	64,05	7.846.707.000,00	64,25	7.964.407.605,00	64,45	7.944.051.681,00	64,65	8.024.492.197,00	64,85	8.205.737.119,00
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,23	86,23	87,23		88,23		89,23		90,23		91,23	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.599.515.000,00		5.655.510.150,00		5.712.065.251,00		5.769.185.904,00		7.326.877.763,00
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	2,03	2,03	2,03	5.599.515.000,00	2,41	5.655.510.150,00	2,79	5.712.065.251,00	3,17	5.769.185.904,00	3,53	7.326.877.763,00
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	56,48	56	56,07		57,14		57,88		58,91		60,2	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					15.776.742.000,00		15.934.509.420,00		16.093.854.514,00		16.254.793.059,00		16.417.340.989,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/ Aman (%)	59,4	61,72	61,72	15.776.742.000,00	62,72	15.934.509.420,00	63,72	16.093.854.514,00	64,72	16.254.793.059,00	65,72	16.417.340.989,00
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					200.000.000,00		1.500.000.000,00		750.000.000,00		1.500.000.000,00		750.000.000,00
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	2	0	2	200.000.000,00	2	1.500.000.000,00	3	750.000.000,00	3	1.500.000.000,00	3	750.000.000,00
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.057.725.000,00		5.108.302.250,00		5.159.385.272,00		5.210.979.125,00		5.263.088.916,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	82,59	83,59	84,59	5.057.725.000,00	85,49	5.108.302.250,00	86,39	5.159.385.272,00	87,29	5.210.979.125,00	88,19	5.263.088.916,00
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.500.000.000,00		3.640.000.000,00		3.785.600.000,00		3.937.024.000,00		4.094.504.960,00
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	82,59	83,59	84,59	3.500.000.000,00	85,49	3.640.000.000,00	86,39	3.785.600.000,00	87,29	3.937.024.000,00	88,19	4.094.504.960,00
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					-		-		100.000.000,00		-		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	100.000.000,00	0	-	0	-
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					150.000.000,00		156.000.000,00		13.162.240.000,00		15.688.729.600,00		9.316.278.784,00
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	85,66	86,16	86,66	150.000.000,00	87,16	156.000.000,00	87,66	13.162.240.000,00	88,16	15.688.729.600,00	88,66	9.316.278.784,00
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					-		-		-		100.000.000,00		-
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000,00	0	-
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					29.487.262.642,00		31.361.478.416,00		32.615.937.552,00		39.920.575.055,00		50.084.171.202,00
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	31,65	32,65	33,15	29.487.262.642,00	34,65	31.361.478.416,00	36,15	32.615.937.552,00	37,65	39.920.575.055,00	39,15	50.084.171.202,00
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					45.000.000,00		45.450.000,00		45.904.500,00		46.363.545,00		46.827.180,00
Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	90	90	95	45.000.000,00	97	45.450.000,00	100	45.904.500,00	100	46.363.545,00	100	46.827.180,00
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					175.000.000,00		189.000.000,00		196.560.000,00		204.422.400,00		212.599.296,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	90	90	90	175.000.000,00	100	189.000.000,00	100	196.560.000,00	100	204.422.400,00	100	212.599.296,00
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					<b>67.837.951.642,00</b>		<b>71.554.657.841,00</b>		<b>85.565.598.770,00</b>		<b>96.656.564.885,00</b>		<b>101.717.426.209,00</b>

Tabel 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang	Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang dan Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman				Indeks Infrastruktur (Angka)				
					Ketaatan Terhadap RTRW (%)				
					Timbulan Sampah yang ditangani (%)				
		Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten					Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)		
							Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)		
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi					Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
							Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
							Terlaksananya pemeliharaan Tanggul dan tebing sungai		1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
							Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai								
Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku								

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0132 – Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
				Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 – Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman			Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	
					Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
				Meningkatnya Ketersediaan Air Minum Bagi Rumah Tangga		1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
			Meningkatnya layanan persampahan regional		Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
				Tersedianya sarana dan prasarana persampahan		1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)		1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0018 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Terlaksanannya kegiatan Pengelolaan, sistem, Pembangunan, Pemeliharaan Drainase			1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
				Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
				Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
				Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0025 - Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)
			Terselenggaranya infrastruktur permukiman dikawasan strategis			1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	1.03.07.2.01.0033 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik			Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)		
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian izin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
						1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata			Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
		Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
					Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang (%)		
					Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang		1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Ruang Daerah Kabupaten Bejgkayang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
		Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Jalan dan jembatan Kabupaten	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	
						Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
							1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan
		Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat			Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi Bersertifikat (Orang)	
			Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja jasa Konstruksi yang bersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
				Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Bengkayang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Predikat Nilai Sakip (Kategori)			
						Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1.03.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Tabel 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>								
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	44,61	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	60,72	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
3	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588
<b>II</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	67,09	67,09	67,7	68,52	69,16	69,93	70,66
<b>III</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>								
1	Indeks Infrastruktur	Angka	56,73	58,66	59,26	59,93	60,65	61,44	62,28
2	Ketaatan Terhadap RTRW	%	84,09	90	100	100	100	100	100
3	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Angka	31,65	31,65	32,65	33,65	34,65	35,65	36,65
4	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
6	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Angka	0,21	0,83	2,03	2,41	2,79	3,17	3,53
7	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	KM	260,51	260,51	268,74	276,97	285,2	293,43	301,66
8	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	%	80	80	80	80,7	80,7	81,48	81,48
9	Luas wilayah perkotaan	Ha	25.242	25.242	25.242	25.242,43	25.342,43	25.342,43	25.442,43
10	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	187.998	187.998	189.477	190.957	192.437	193.917	195.397
11	Rasio jaringan irigasi	%	0,56	0,83	1,24	1,66	2,07	2,48	2,9
12	Persentase Penduduk berakses Air minum	%	59,4	68,59	69,79	70,99	72,19	73,39	74,59
13	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	Unit	25	25	25	26	26	27	27
14	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Kategori	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
15	Proporsi Panjang Jembatan Kayu dalam kondisi baik dan sedang	Unit	60	60	60	62	64	66	68

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
16	Luas wilayah industri	Ha	200	200	200	200	250	300	450
17	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	82,79	83,69	84,59	85,49	86,39	87,29	88,19
18	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	203.003	203.003	206.555	210.106	213.658	217.209	220.761
19	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
20	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	31,65	31,65	33,15	34,65	36,15	37,65	39,15
21	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
22	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	2.275,06	2.275,06	2.246,29	2.251,47	2.268,32	2.297,54	2.338,81
23	Luas wilayah produksi	Ha	312.281,53	312.281,53	312.281,53	312.481,53	312.481,53	312.581,53	312.581,53
24	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

**Tabel 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				67.837.951.642		71.554.657.841		85.565.598.770		96.656.564.885		101.717.426.209
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.846.707.000		7.964.407.605		7.944.051.681		8.024.492.197		8.205.737.119
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	63,35	64,05	7.846.707.000	64,25	7.964.407.605	64,45	7.944.051.681	64,65	8.024.492.197	64,85	8.205.737.119
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,23	87,23		88,23		89,23		90,23		91,23	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.536.707.000		6.637.407.605		6.554.051.681		6.596.051.681		6.720.737.119
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75/14	86/14	6.536.707.000	86/14	6.637.407.605	86/14	6.554.051.681	86/14	6.596.051.681	86/14	6.720.737.119
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.521.707.000		6.622.407.605		6.539.051.681		6.581.051.681		6.705.737.119
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75/14	86/14	6.521.707.000	86/14	6.622.407.605	86/14	6.539.051.681	86/14	6.581.051.681	86/14	6.705.737.119
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		0		0		0
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		0		0		0
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000		12.000.000		14.000.000		14.000.000		26.000.000
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			10.000.000		12.000.000		14.000.000		14.000.000		26.000.000
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		1	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0
1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		10.000.000
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		12.000.000		14.000.000		14.000.000		16.000.000
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000
1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		6.000.000
Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	6.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
1.03.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		0		0		0		0
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				0		0		0		0		0
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		6.000.000
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	6.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		0		0		0		0	
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		0		0
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		0		0		0
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				314.000.000		328.000.000		354.000.000		362.440.516		375.000.000
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	314.000.000	0	328.000.000	0	354.000.000	0	362.440.516	0	375.000.000
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		54.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000.000	1	54.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		0
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		60.000.000		68.440.516		70.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	68.440.516	1	70.000.000
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				129.000.000		129.000.000		129.000.000		129.000.000		140.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	129.000.000	1	129.000.000	1	129.000.000	1	129.000.000	1	140.000.000
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		0		0
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000		20.000.000		30.000.000		60.000.000		70.000.000
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	30.000.000	0	60.000.000	0	70.000.000
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0	1	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0	0	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		1		1	1	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		1	0	
1.03.01.2.07.0001 – Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0	0
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07.0002 – Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0			40.000.000
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000.000
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0		0		0		0			0
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000		20.000.000		0		30.000.000			30.000.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	0
1.03.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		30.000.000		30.000.000			0
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0	0
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0			0
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0			0
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.000.000		440.000.000		440.000.000		440.000.000			460.000.000
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	440.000.000	3	440.000.000	3	440.000.000	3	440.000.000	3	460.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			10.000.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000			180.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	160.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000	3	180.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				475.000.000		475.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	475.000.000	1	475.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	30		30		30		30		30	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30		30		30		30		30	
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6		
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	30	220.000.000	30	220.000.000	30	220.000.000	30	220.000.000	30	220.000.000
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	20.000.000	20	20.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				5.599.515.000		5.655.510.150		5.712.065.251		5.769.185.904		7.326.877.763
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	56,48	56,07	5.599.515.000	57,14	5.655.510.150	57,88	5.712.065.251	58,91	5.769.185.904	60,2	7.326.877.763
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	2,03	2,03		2,41		2,79		3,17		3,53	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.700.000.000		4.755.995.150		4.812.550.251		4.869.670.904		6.427.362.763
Terlaksananya pemeliharaan Tanggul dan tebing sungai	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)			4.700.000.000		4.755.995.150		4.812.550.251		4.869.670.904		6.427.362.763
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)											
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)											
	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	4		4		4		4		4	
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,69	1,09		1,12		1,16		1,19		2,14	
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	26,606	17,86		17,86		17,86		17,86		17,86	
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				0		0		0		0		0
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0
1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	26,606	17,86	2.500.000.000	17,86	2.500.000.000	17,86	2.500.000.000	17,86	2.500.000.000	17,86	2.500.000.000
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				1.800.000.000		1.855.995.150		1.912.550.251		1.969.670.904		3.527.362.763
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,69	1,09	1.800.000.000	1,12	1.855.995.150	1,16	1.912.550.251	1,19	1.969.670.904	2,14	3.527.362.763
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				899.515.000		899.515.000		899.515.000		899.515.000		899.515.000
Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	0	0	899.515.000	0	899.515.000	0	899.515.000	0	899.515.000	0	899.515.000
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0	0		0		0		0		0	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	7		7		7		7		7	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0	23		23		23		23		23	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	0		0		0		0		0	
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				699.515.000		699.515.000		699.515.000		699.515.000		699.515.000
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0	23	699.515.000	23	699.515.000	23	699.515.000	23	699.515.000	23	699.515.000
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				0		0		0		0		0
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				0		0		0		0		0
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				15.776.742.000		15.934.509.420		16.093.854.514		16.254.793.059		16.417.340.989
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	59,4	61,72	15.776.742.000	62,72	15.934.509.420	63,72	16.093.854.514	64,72	16.254.793.059	65,72	16.417.340.989
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				15.776.742.000		15.934.509.420		16.093.854.514		16.254.793.059		16.417.340.989
Meningkatnya Ketersediaan Air Minum Bagi Rumah Tangga	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	20	15.776.742.000	20	15.934.509.420	20	16.093.854.514	20	16.254.793.059	20	16.417.340.989
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	0		0		5		0		0	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0	0		3		0		3		0	
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	70		0		0		0		50	
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	0	300		300		300		300		300	
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	0		0		0		50		0	
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		4	
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	0	300	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0		650.000.000		0		650.000.000		0
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0	0	0	3	650.000.000	0	0	3	650.000.000	0	0
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0		0		967.112.514		0		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	0	0	0	0	5	967.112.514	0	0	0	0
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				14.826.742.000		14.984.509.420		14.826.742.000		14.826.742.000		14.826.742.000
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	20	14.826.742.000	20	14.984.509.420	20	14.826.742.000	20	14.826.742.000	20	14.826.742.000
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0		0		0		0		640.598.989
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	640.598.989
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				650.000.000		0		0		0		650.000.000
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sumbangan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	70	650.000.000	0	0	0	0	0	0	50	650.000.000
1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				0		0		0		478.051.059		0
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	50	478.051.059	0	0
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				200.000.000		1.500.000.000		750.000.000		1.500.000.000		750.000.000
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	2	2	200.000.000	2	1.500.000.000	3	750.000.000	3	1.500.000.000	3	750.000.000
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		1.500.000.000		750.000.000		1.500.000.000		750.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	200.000.000	0	1.500.000.000	0	750.000.000	0	1.500.000.000	3	750.000.000
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0	2		10		0		10		0	
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	0	0		0		5		0		0	
1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0		0		750.000.000		0		0
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	0	0	0	0	0	5	750.000.000	0	0	0	0
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0		0		0		0		750.000.000
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	750.000.000
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				200.000.000		1.500.000.000		0		1.500.000.000		0
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0	2	200.000.000	10	1.500.000.000	0	0	10	1.500.000.000	0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.057.725.000		5.108.302.250		5.159.385.272		5.210.979.125		5.263.088.916
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	82,59	84,59	5.057.725.000	85,49	5.108.302.250	86,39	5.159.385.272	87,29	5.210.979.125	88,19	5.263.088.916
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.057.725.000		5.108.302.250		5.159.385.272		5.210.979.125		5.263.088.916
Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	0	0	5.057.725.000	0	5.108.302.250	0	5.159.385.272	0	5.210.979.125	0	5.263.088.916
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0	0		0		2		0			
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit)											
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M <sup>3</sup> /Hari)	0	0		0		0		0			
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)											
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)											
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)											
1.03.05.2.01.0018 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu				0		0		0		0		0
Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit)			0		0		0		0		0
1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0		0		0		0		0
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)			0		0		0		0		0
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				0		0		0		0		0
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)			0		0		0		0		0
1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				4.407.725.000		4.458.302.250		4.509.385.272		4.560.979.125		4.613.088.916
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)			4.407.725.000		4.458.302.250		4.509.385.272		4.560.979.125		4.613.088.916
1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0		0		0		0		0
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M <sup>3</sup> /Hari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				0		0		0		0		0
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>				<b>3.500.000.000</b>		<b>3.640.000.000</b>		<b>3.785.600.000</b>		<b>3.937.024.000</b>		<b>4.094.504.960</b>
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	82,59	84,59	3.500.000.000	85,49	3.640.000.000	86,39	3.785.600.000	87,29	3.937.024.000	88,19	4.094.504.960
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.500.000.000		3.640.000.000		3.785.600.000		3.937.024.000		4.094.504.960
Terlaksanannya kegiatan Pengelolaan, sistem, Pembangunan, Pemeliharaan Darinase	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	0		3.500.000.000	0	3.640.000.000	0	3.785.600.000	0	3.937.024.000	1	4.094.504.960
	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0		0		1		0			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0		0		1		0		0	
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0		0		0		0		1	
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0		0		0		0		1	
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	0	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	0	0		300		0		400		0	
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	0	1.500	3.500.000.000	1.500	3.500.000.000	1.500	3.500.000.000	1.500	3.500.000.000	1.500	3.500.000.000
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				0		140.000.000		0		237.024.000		0
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	0	0	0	300	140.000.000	0	0	400	237.024.000	0	0
1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				0		0		0		200.000.000		0
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0
1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan				0		0		0		0		194.504.960
Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	194.504.960

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.06.2.01.0025 - Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				0		0		0		0		200.000.000
Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				0		0		0		0		200.000.000
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				0		0		285.600.000		0		0
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	0	0	0	1	285.600.000	0	0	0	0
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				0		0		100.000.000		0		0
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0
1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		0		100.000.000		0		0
Terselenggaranya infrastruktur permukiman di kawasan strategis	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	0	0		0		15		0		0	
1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.07.2.01.0033 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				0		0		100.000.000		0		0
Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	0	0	0	0	0	15	100.000.000	0	0	0	0
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				150.000.000		156.000.000		13.162.240.000		15.688.729.600		9.316.278.784
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	85,66	86,66	150.000.000	87,16	156.000.000	87,66	13.162.240.000	88,16	15.688.729.600	88,66	9.316.278.784
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				150.000.000		156.000.000		13.162.240.000		15.688.729.600		9.316.278.784
Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	0	0	150.000.000	0	156.000.000	2	13.162.240.000	2	15.688.729.600	0	9.316.278.784

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	0	20		20		20		20		20		20
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		1		1		2		2
1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000.000		10.000.000.000			0
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	0	0	0	0	0	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	0		0
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		0		3.012.240.000		5.538.729.600			9.166.278.784
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	3.012.240.000	1	5.538.729.600	2		9.166.278.784
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				150.000.000		156.000.000		150.000.000		150.000.000			150.000.000
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	0	20	150.000.000	20	156.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20		150.000.000
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				0		0		0		100.000.000			0
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0		0
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		100.000.000			0
Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)			0		0		0		100.000.000			0
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		100.000.000			0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)			0		0		0		100.000.000		0
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				29.487.262.642		31.361.478.416		32.615.937.552		39.920.575.055		50.084.171.202
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	31,65	33,15	29.487.262.642	34,65	31.361.478.416	36,15	32.615.937.552	37,65	39.920.575.055	39,15	50.084.171.202
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				29.487.262.642		31.361.478.416		32.615.937.552		39.920.575.055		50.084.171.202
Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Jalan dan jembatan Kabupaten	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	500	500	29.487.262.642	500	31.361.478.416	500	32.615.937.552	500	39.920.575.055	500	50.084.171.202
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	4	4		4		4		4		4	
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	5	5		5		5		5		5	
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	4	4		4		4		4		4	
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	3,89	3,89		4,23		4,46		5,79		7,63	
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0,13	0,13		0,13		0,13		0,13		0,13	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1	1		1		1		1		1	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0,8	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0,17	0,17		0,17		0,17		0,17		0,17	
	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	4	4		4		4		4		4	
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	8	8		8		8		8		8	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	10	10		10		10		10		10	
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	5	5		5		5		5		5	
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	5	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	500	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0,17	0,17	1.000.000.000	0,17	1.000.000.000	0,17	1.000.000.000	0,17	1.000.000.000	0,17	1.000.000.000
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0,13	0,13	500.000.000	0,13	500.000.000	0,13	500.000.000	0,13	500.000.000	0,13	500.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0,8	0,8	1.600.000.000	0,8	1.600.000.000	0,8	1.600.000.000	0,8	1.600.000.000	0,8	1.600.000.000
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	5	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				21.387.262.642		23.261.478.416		24.515.937.552		31.820.575.055		41.984.171.202
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	3,89	3,89	21.387.262.642	4,23	23.261.478.416	4,46	24.515.937.552	5,79	31.820.575.055	7,63	41.984.171.202
1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	8	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				45.000.000		45.450.000		45.904.500		46.363.545		46.827.180
Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	90	95	45.000.000	97	45.450.000	100	45.904.500	100	46.363.545	100	46.827.180
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja jasa Konstruksi yang bersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		15.450.000		15.904.500		16.363.545		16.827.180
Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.450.000	1	15.904.500	1	16.363.545	1	16.827.180
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				15.000.000		15.450.000		15.904.500		16.363.545		16.827.180
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.450.000	1	15.904.500	1	16.363.545	1	16.827.180
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				175.000.000		189.000.000		196.560.000		204.422.400		212.599.296
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	90	90	175.000.000	100	189.000.000	100	196.560.000	100	204.422.400	100	212.599.296

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		74.000.000		81.560.000		89.422.400		97.599.296
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantaaan Ruang Daerah Kabupaten Bengkayang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	60	60.000.000	65	74.000.000	70	81.560.000	75	89.422.400	80	97.599.296
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				60.000.000		74.000.000		81.560.000		89.422.400		97.599.296
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	60	60.000.000	65	74.000.000	70	81.560.000	75	89.422.400	80	97.599.296
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	0	0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	0	0		0		0		0		0		0
1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				0		0		0		0		0	
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.04.0008 – Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				0		0		0		0		0	
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Tabel 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai 1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
2	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
3	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
4	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
5	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
6	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
7	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan 1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan
8	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

#### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. **Spesifik dan jelas**, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi;
- b. **Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif**, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama;
- c. **Relevan**, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
- d. **Dapat dicapai**, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses;
- e. **Fleksibel dan sensitif** terhadap perubahan /penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. **Efektif**, data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah);
- b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);

Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).



#### **4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penentuan target keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-20229 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) yang juga memiliki keterkaitan dengan IKU Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

#### **4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

Penentuan target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah tahun 2025- 2029 melalui indikator Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi perangkat daerah pemangku urusan pemerintah daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sebagai perangkat daerah pemangku urusan Pekerjaan Umum memiliki Indikator Kunci Daerah (IKD) yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terkait Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dalam menunjang Indikator Kunci Daerah (IKD) Kabupaten Bengkayang sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029.

**Tabel 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
1	Ketaatan Terhadap RTRW	%	84,09	90	100	100	100	100	100
2	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis	%	86,66	95,33	100	100	100	100	100
3	Kapasitas Air Baku Kabupaten	Liter/Detik	1729,5	1744,5	1759,5	1774,5	1789,5	1804,5	1819,5
4	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Angka	31,65	31,65	32,65	33,65	34,65	35,65	36,65
5	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
6	Predikat Nilai Sakip	Kategori	B	B	B	B	B	B	B
7	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Angka	0,21	0,83	2,03	2,41	2,79	3,17	3,53
8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
9	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	82,79	83,69	84,59	85,49	86,39	87,29	88,19
10	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi	Unit	2	3	3	3	4	4	4

**Tabel 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Indeks Infrastruktur	positif	Angka	56,73	58,66	59,26	59,93	60,65	61,44	62,28
2	Ketaatan Terhadap RTRW	komulatif	%	84,09	90	100	100	100	100	100
3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman	komulatif	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
4	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	komulatif	Angka	31,65	31,65	32,65	33,65	34,65	35,65	36,65
5	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	komulatif	Angka	0,21	0,83	2,03	2,41	2,79	3,17	3,53
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman	komulatif	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
7	Luas wilayah produksi	positif	Ha	312.281,53	312.281,53	312.281,53	312.481,53	312.481,53	312.581,53	312.581,53
8	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	positif	%	82,79	83,69	84,59	85,49	86,39	87,29	88,19
9	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	positif	KM	260,51	260,51	268,74	276,97	285,2	293,43	301,66
10	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	positif	%	80	80	80	80,7	80,7	81,48	81,48
11	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	positif	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
12	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	komulatif	%	31,65	31,65	33,15	34,65	36,15	37,65	39,15
13	Proporsi Panjang Jembatan Kayu dalam kondisi baik dan sedang	positif	Unit	60	60	60	62	64	66	68
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	positif	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
15	Rasio jaringan irigasi	positif	%	0,56	0,83	1,24	1,66	2,07	2,48	2,9
16	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	komulatif	%	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
17	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	komulatif	Kategori	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
18	Persentase Penduduk berakses Air minum	positif	%	59,4	68,59	69,79	70,99	72,19	73,39	74,59
19	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	positif	Unit	25	25	25	26	26	27	27
20	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	positif	Orang	203.003	203.003	206.555	210.106	213.658	217.209	220.761
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	positif	Orang	187.998	187.998	189.477	190.957	192.437	193.917	195.397
22	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	positif	Ha	2.275,06	2.275,06	2.246,29	2.251,47	2.268,32	2.297,54	2.338,81
23	Luas wilayah industri	positif	Ha	200	200	200	200	250	300	450
24	Luas wilayah perkotaan	positif	Ha	25.242	25.242	25.242	25.242,43	25.342,43	25.342,43	25.442,43



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Apabila diperlukan akan dilakukan revisi kembali muatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah ini termasuk indikator-indikator kinerjanya dan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 - 2029 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bengkayang, September 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkulu Tengah



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode  
Email : dpuprkabbengkayang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 15/PUPR/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 – 2029**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakandan sasaran pokok pembangunan daerah tahun 2025–2029 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan membentuk Tim;
  - b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu penetapan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 91);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang (RENSTRA-DPUPR) Kabupaten



- Bengkayang Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dan tetap mengacu efisiensi anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 13 Januari 2025

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkulu Tengah



**MARTINUS PONES, ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661112 200003 1 004

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Yang bersangkutan;
4. *Arsip*.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 15/PUPR/TAHUN 2025  
TANGGAL : 13 JANUARI 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN 2025 – 2029

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Marga;	Anggota
4	Kepala Bidang Cipta Karya;	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Air;	Anggota
6	Kepala Bidang Tata Ruang;	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;	Anggota Anggota
9	Penelaah Teknis Kebijakan.	



Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang

**MARTINUS PONES, ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661112 200003 1 004

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	55,7	56,4	58,04	59,6	53,44	58,75	37,17	31,65	0,96	1,04	0,64	0,53
		Persentase Tenaga Terampil yang Dilatih	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	95	N/A	N/A	N/A	1,36
2	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,00218	0,00227	0,00235	0,00248	N/A	0,60657859	0,7	0,0021	N/A	267,22	297,87	84,68
		Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	34,38	38,61	42,84	47,07	56,24	56,24	50,61	56,48	100	1,46	1,18	1,20
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Rumah tangga berakses air minum (%)	65,82	67,82	69,82	71,82	60,62	60,92	59,53	60,25	92,1	0,90	0,85	0,84
		Rumah tangga bersanitasi (%)	49,01	54,01	59,01	64,01	45,16	45,35	44,14	45,21	92,15	0,84	0,75	0,71
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	N/A	40	45	50	N/A	72,27	72,45	82,79	N/A	1,81	1,61	1,66
4	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rumah tangga pengguna listrik PLN	N/A	51,000	53,718	56,403	N/A	57,780	59,980	58,990	N/A	1,13	1,12	1,05
5	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (RTRW) (%)	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	1,00	1,00	1,00
		Rasio bangunan ber IMB per Satuan bangunan	N/A	N/A	N/A	11,5	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A	N/A	1,30
		Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	86,66	N/A	N/A	N/A	1,73
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset Pemerintah	Persentase Penatausahaan, Anggaran, Keuangan dan Aset OPD	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	96,64	N/A	N/A	N/A	0,97

Bengkayang, September 2025  
Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES, ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661112 200003 1 004

Tabel T-C.24  
Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>BELANJA DAERAH</b>														
<b>Belanja Operasi</b>	48.802.738.010	59.481.727.993	45.569.264.298	28.987.262.204	31.726.861.384	39.581.506.389	43.629.468.935	28.041.247.534	0,7	0,7	1,0	1,0	(0,57)	(0,36)
- Belanja Pegawai	4.769.806.309	5.036.303.694	5.276.850.206	5.384.568.135	4.480.260.243	4.612.957.178	5.238.217.022	5.029.038.653	0,9	0,9	1,0	0,9	0,02	(0,04)
- Belanja Barang dan Jasa	44.032.931.701	54.445.424.299	40.292.414.092	23.602.694.069	27.246.601.141	34.968.549.211	38.391.251.913	23.012.208.881	0,6	0,6	1,0	1,0	(0,71)	(0,40)
<b>Belanja Modal</b>	339.006.340.194	317.918.610.180	167.856.845.505	97.942.818.381	82.345.835.377	254.631.462.584	144.621.575.691	93.540.645.121	0,2	0,8	0,9	1,0	(0,71)	(0,35)
- Belanja Modal Tanah	98.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.848.135.857	865.032.640	270.584.500	84.850.000	2.770.221.097	815.174.532	267.015.500	83.890.000	1,0	0,9	1,0	1,0	(2,19)	(0,69)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.910.469.000	19.690.121.321	15.597.810.000	5.917.288.000	3.851.912.680	19.603.573.081	14.007.513.810	5.916.289.000	0,8	1,0	0,9	1,0	(1,64)	(0,58)
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	331.149.735.337	297.363.456.219	151.988.451.005	91.940.680.381	75.723.701.600	234.212.714.971	130.347.046.381	87.540.466.121	0,2	0,8	0,9	1,0	(0,65)	(0,33)

Bengkayang, September 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

<b>VISI</b>	<b>: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN</b>
<b>MISI No 3</b>	<b>: Melanjutkan pembangunan infrastruktur</b>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang dan Meningkatkan kualitas Kawasan Permukiman	1 Meningkatkan kapasitas Air Baku Kabupaten	1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber Air Baku Kabupaten	1 Peningkatan Kualitas Layanan Air Baku;	
		2 Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	2 Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah aliran sungai (DAS) atau drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim;	
	2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	3 Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM	3 Percepatan Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi Primer dan Sekunder secara Partisipatif;	3 Percepatan Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi Primer dan Sekunder secara Partisipatif;
			4 Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	4 Penambahan air irigasi sesuai potensi pemanfaatan sumber daya alam daerah;
	3 Meningkatkan Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	7 Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung demi kelayakan bangunan	5 Peningkatan Kualitas Layanan dan Distribusi Air Minum Kepada Masyarakat;	5 Peningkatan Kualitas Layanan dan Distribusi Air Minum Kepada Masyarakat;
			6 Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan;	6 Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan;
			7 Perluasan jaringan PDAM ke seluruh pelosok antara lain melalui pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM) baru;	7 Perluasan jaringan PDAM ke seluruh pelosok antara lain melalui pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM) baru;
			8 Pengembangan dan pembangunan teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersih yang layak minum;	8 Pengembangan dan pembangunan teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersih yang layak minum;
			9 Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestic permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat;	9 Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestic permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat;
	3 Meningkatkan Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	7 Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung demi kelayakan bangunan	10 Percepatan pembangunan dan pengelolaan drainase perkotaan yang maksimal;	10 Percepatan pembangunan dan pengelolaan drainase perkotaan yang maksimal;
			11 Pengembangan dan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bengkayang;	11 Pengembangan dan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bengkayang;
	3 Meningkatkan Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	7 Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung demi kelayakan bangunan	12 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;	12 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
			13 Optimalisasi Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Pemerintah untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;	13 Optimalisasi Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Pemerintah untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			14 Peningkatan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan Gedung dengan lingkungannya;
	4 Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	8 Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, trotoar, drainase Pendukung Jalan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan	15 Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan, Jembatan, drainase tepi jalan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan;
	5 Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	9 Melakukan pendataan terhadap tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat	16 Melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan kepada Tenaga ahli Konstruksi Kualifikasi;
	6 Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	10 Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang	17 Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang serta meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang;
			18 Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik;
	7 Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur	11 Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	19 Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan penyediaan sarana dan prasarana dalam urusan kepegawaian;
	8 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 Memaksimalkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku	20 Melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bengkayang, September 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

## TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										
Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang	Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang dan Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman		Indeks Infrastruktur (Angka)	56,73	58,66	59,26	59,93	60,65	61,44	62,28
			Ketaatan Terhadap RTRW (%)	84,09	90	100	100	100	100	100
			Timbulan Sampah yang ditangani (%)	14,9	15	18	23	30	38	45
		Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	1729,5	1744,5	1759,5	1774,5	1789,5	1804,5	1819,5
			Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	0,21	0,83	2,03	2,41	2,79	3,17	3,53
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	82,79	83,69	84,59	85,49	86,39	87,29	88,19
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	2	3	3	3	4	4	4
		Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	86,66	95,33	100	100	100	100	100
		Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang (%)	90	90	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	31,65	31,65	32,65	33,65	34,65	35,65	36,65
		Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi Bersertifikat (Orang)	90	95	97	100	100	100	100
Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat Nilai Sakip (Kategori)	B	B	B	B	B	B	B		

Bengkayang, September 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

**PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					67.837.951.642,00		71.554.657.841,00		85.565.598.770,00		96.656.564.885,00		101.717.426.209,00
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.846.707.000,00		7.964.407.605,00		7.944.051.681,00		8.024.492.197,00		8.205.737.119,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	63,35	63,85	64,05	7.846.707.000,00	64,25	7.964.407.605,00	64,45	7.944.051.681,00	64,65	8.024.492.197,00	64,85	8.205.737.119,00
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,23	86,23	87,23		88,23		89,23		90,23		91,23	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.599.515.000,00		5.655.510.150,00		5.712.065.251,00		5.769.185.904,00		7.326.877.763,00
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	2,03	2,03	2,03	5.599.515.000,00	2,41	5.655.510.150,00	2,79	5.712.065.251,00	3,17	5.769.185.904,00	3,53	7.326.877.763,00
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	56,48	56	56,07		57,14		57,88		58,91		60,2	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					15.776.742.000,00		15.934.509.420,00		16.093.854.514,00		16.254.793.059,00		16.417.340.989,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/ Aman (%)	59,4	61,72	61,72	15.776.742.000,00	62,72	15.934.509.420,00	63,72	16.093.854.514,00	64,72	16.254.793.059,00	65,72	16.417.340.989,00
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					200.000.000,00		1.500.000.000,00		750.000.000,00		1.500.000.000,00		750.000.000,00
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	2	0	2	200.000.000,00	2	1.500.000.000,00	3	750.000.000,00	3	1.500.000.000,00	3	750.000.000,00
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.057.725.000,00		5.108.302.250,00		5.159.385.272,00		5.210.979.125,00		5.263.088.916,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	82,59	83,59	84,59	5.057.725.000,00	85,49	5.108.302.250,00	86,39	5.159.385.272,00	87,29	5.210.979.125,00	88,19	5.263.088.916,00
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.500.000.000,00		3.640.000.000,00		3.785.600.000,00		3.937.024.000,00		4.094.504.960,00
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	82,59	83,59	84,59	3.500.000.000,00	85,49	3.640.000.000,00	86,39	3.785.600.000,00	87,29	3.937.024.000,00	88,19	4.094.504.960,00
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					-		-		100.000.000,00		-		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	100.000.000,00	0	-	0	-
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					150.000.000,00		156.000.000,00		13.162.240.000,00		15.688.729.600,00		9.316.278.784,00
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	85,66	86,16	86,66	150.000.000,00	87,16	156.000.000,00	87,66	13.162.240.000,00	88,16	15.688.729.600,00	88,66	9.316.278.784,00
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					-		-		-		100.000.000,00		-
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000,00	0	-
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					29.487.262.642,00		31.361.478.416,00		32.615.937.552,00		39.920.575.055,00		50.084.171.202,00
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	31,65	32,65	33,15	29.487.262.642,00	34,65	31.361.478.416,00	36,15	32.615.937.552,00	37,65	39.920.575.055,00	39,15	50.084.171.202,00
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					45.000.000,00		45.450.000,00		45.904.500,00		46.363.545,00		46.827.180,00
Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	90	90	95	45.000.000,00	97	45.450.000,00	100	45.904.500,00	100	46.363.545,00	100	46.827.180,00
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					175.000.000,00		189.000.000,00		196.560.000,00		204.422.400,00		212.599.296,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	90	90	90	175.000.000,00	100	189.000.000,00	100	196.560.000,00	100	204.422.400,00	100	212.599.296,00
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					<b>67.837.951.642,00</b>		<b>71.554.657.841,00</b>		<b>85.565.598.770,00</b>		<b>96.656.564.885,00</b>		<b>101.717.426.209,00</b>

Bengkayang, September 2025

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN <i>(1)</i>	TUJUAN <i>(2)</i>	SASARAN <i>(3)</i>	OUTCOME <i>(4)</i>	OUTPUT <i>(5)</i>	INDIKATOR <i>(6)</i>	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN <i>(7)</i>		
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang	Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang dan Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman				Indeks Infrastruktur (Angka)			
					Ketaatan Terhadap RTRW (%)			
					Timbulan Sampah yang ditangani (%)			
		Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten					Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	
							Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi					Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
							Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
							Terlaksananya pemeliharaan Tanggul dan tebing sungai	
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai							
Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku							
					1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman			Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	
					Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
				Meningkatnya Ketersediaan Air Minum Bagi Rumah Tangga		1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01.0029 – Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
			Meningkatnya layanan persampahan regional		Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
				Tersedianya sarana dan prasarana persampahan		1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Humian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)		1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0018 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
				Terlaksanannya kegiatan Pengelolaan, sistem, Pembangunan, Pemeliharaan Darainase		1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
					Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0025 - Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
				Terseleenggaranya infrastruktur permukiman dikawasan strategis		1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	1.03.07.2.01.0033 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik			Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung		1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
				Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
		Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang			Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang (%)	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang		1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
				Terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantaaan Ruang Daerah Kabupaten Bejgkayang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
		Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten			Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Jalan dan jembatan Kabupaten		1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan
		Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat			Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi Bersertifikat (Orang)	
			Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja jasa Konstruksi yang bersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
				Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel			Predikat Nilai Sakip (Kategori)	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah		1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1.03.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Bengkayang, September 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

## INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>								
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	44,61	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	60,72	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
3	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588
<b>II</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	67,09	67,09	67,7	68,52	69,16	69,93	70,66
<b>III</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>								
1	Indeks Infrastruktur	Angka	56,73	58,66	59,26	59,93	60,65	61,44	62,28
2	Ketaatan Terhadap RTRW	%	84,09	90	100	100	100	100	100
3	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Angka	31,65	31,65	32,65	33,65	34,65	35,65	36,65
4	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
6	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Angka	0,21	0,83	2,03	2,41	2,79	3,17	3,53
7	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	KM	260,51	260,51	268,74	276,97	285,2	293,43	301,66
8	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	%	80	80	80	80,7	80,7	81,48	81,48
9	Luas wilayah perkotaan	Ha	25.242	25.242	25.242	25.242,43	25.342,43	25.342,43	25.442,43
10	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	187.998	187.998	189.477	190.957	192.437	193.917	195.397
11	Rasio jaringan irigasi	%	0,56	0,83	1,24	1,66	2,07	2,48	2,9
12	Persentase Penduduk berakses Air minum	%	59,4	68,59	69,79	70,99	72,19	73,39	74,59
13	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	Unit	25	25	25	26	26	27	27
14	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Kategori	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
15	Proporsi Panjang Jembatan Kayu dalam kondisi baik dan sedang	Unit	60	60	60	62	64	66	68

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
16	Luas wilayah industri	Ha	200	200	200	200	250	300	450
17	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	82,79	83,69	84,59	85,49	86,39	87,29	88,19
18	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	203.003	203.003	206.555	210.106	213.658	217.209	220.761
19	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
20	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	31,65	31,65	33,15	34,65	36,15	37,65	39,15
21	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
22	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	2.275,06	2.275,06	2.246,29	2.251,47	2.268,32	2.297,54	2.338,81
23	Luas wilayah produksi	Ha	312.281,53	312.281,53	312.281,53	312.481,53	312.481,53	312.581,53	312.581,53
24	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Bengkayang, September 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				67.837.951.642		71.554.657.841		85.565.598.770		96.656.564.885		101.717.426.209
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.846.707.000		7.964.407.605		7.944.051.681		8.024.492.197		8.205.737.119
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	63,35	64,05	7.846.707.000	64,25	7.964.407.605	64,45	7.944.051.681	64,65	8.024.492.197	64,85	8.205.737.119
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,23	87,23		88,23		89,23		90,23		91,23	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.536.707.000		6.637.407.605		6.554.051.681		6.596.051.681		6.720.737.119
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75/14	86/14	6.536.707.000	86/14	6.637.407.605	86/14	6.554.051.681	86/14	6.596.051.681	86/14	6.720.737.119
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		0		0		0			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.521.707.000		6.622.407.605		6.539.051.681		6.581.051.681		6.705.737.119
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75/14	86/14	6.521.707.000	86/14	6.622.407.605	86/14	6.539.051.681	86/14	6.581.051.681	86/14	6.705.737.119
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		0		0		0
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000		12.000.000		14.000.000		14.000.000		26.000.000
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			10.000.000		12.000.000		14.000.000		14.000.000		26.000.000
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1			
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0
1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		10.000.000
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		12.000.000		14.000.000		14.000.000		16.000.000
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000
1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		6.000.000
Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	6.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0			
1.03.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		0		0		0		0
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				0		0		0		0		0
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		6.000.000
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	6.000.000
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		0
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		0		0		0
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		0		0		0		0		0
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		0			0
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		0		0			0
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0			0
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			10.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2		10.000.000
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				314.000.000		328.000.000		354.000.000		362.440.516			375.000.000
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	314.000.000	0	328.000.000	0	354.000.000	0	362.440.516	0		375.000.000
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		0
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		0
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000			15.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		54.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000.000	1	54.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		0
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		60.000.000		68.440.516		70.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	68.440.516	1	70.000.000
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				129.000.000		129.000.000		129.000.000		129.000.000		140.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	129.000.000	1	129.000.000	1	129.000.000	1	129.000.000	1	140.000.000
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		0		0
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000		20.000.000		30.000.000		60.000.000		70.000.000
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	30.000.000	0	60.000.000	0	70.000.000
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0					
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		1		1	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		0	
1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		40.000.000
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000.000
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0		0		0		0		0
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000		20.000.000		0		30.000.000		30.000.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000
1.03.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		30.000.000		30.000.000		0
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.000.000		440.000.000		440.000.000		440.000.000		460.000.000
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	440.000.000	3	440.000.000	3	440.000.000	3	440.000.000	3	460.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		180.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	160.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000	3	160.000.000	3	180.000.000
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				475.000.000		475.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	475.000.000	1	475.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	30		30		30		30		30	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30		30		30		30		30	
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6	
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	30	220.000.000	30	220.000.000	30	220.000.000	30	220.000.000	30	220.000.000
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	20.000.000	20	20.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				5.599.515.000		5.655.510.150		5.712.065.251		5.769.185.904		7.326.877.763	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	56,48	56,07	5.599.515.000	57,14	5.655.510.150	57,88	5.712.065.251	58,91	5.769.185.904	60,2	7.326.877.763	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	2,03	2,03		2,41		2,79		3,17		3,53		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.700.000.000		4.755.995.150		4.812.550.251		4.869.670.904		6.427.362.763	
Terlaksananya pemeliharaan Tanggul dan tebing sungai	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)			4.700.000.000		4.755.995.150		4.812.550.251		4.869.670.904		6.427.362.763	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)												
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)												
	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	4		4		4		4		4		4
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,69	1,09		1,12		1,16		1,19		1,19		2,14
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	26,606	17,86		17,86		17,86		17,86		17,86		17,86
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				0		0		0		0		0	
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0	
1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0	
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				0		0		0		0		0	
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	26,606	17,86	2.500.000.000	17,86	2.500.000.000	17,86	2.500.000.000	17,86	2.500.000.000	17,86	2.500.000.000
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				1.800.000.000		1.855.995.150		1.912.550.251		1.969.670.904		3.527.362.763
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,69	1,09	1.800.000.000	1,12	1.855.995.150	1,16	1.912.550.251	1,19	1.969.670.904	2,14	3.527.362.763
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				899.515.000		899.515.000		899.515.000		899.515.000		899.515.000
Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	0	0	899.515.000	0	899.515.000	0	899.515.000	0	899.515.000	0	899.515.000
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0	0		0		0		0		0	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	7		7		7		7		7	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0	23		23		23		23		23	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	0		0		0		0		0	
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				699.515.000		699.515.000		699.515.000		699.515.000		699.515.000
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0	23	699.515.000	23	699.515.000	23	699.515.000	23	699.515.000	23	699.515.000
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				0		0		0		0		0
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				0		0		0		0		0	
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				15.776.742.000		15.934.509.420		16.093.854.514		16.254.793.059		16.417.340.989	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	59,4	61,72	15.776.742.000	62,72	15.934.509.420	63,72	16.093.854.514	64,72	16.254.793.059	65,72	16.417.340.989	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				15.776.742.000		15.934.509.420		16.093.854.514		16.254.793.059		16.417.340.989	
Meningkatnya Ketersediaan Air Minum Bagi Rumah Tangga	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	20	15.776.742.000	20	15.934.509.420	20	16.093.854.514	20	16.254.793.059	20	16.417.340.989	
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	0		0		5		0		0		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0	0		3		0		3		0		
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	70		0		0		0		50		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	0	300		300		300		300		300		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	0		0		0		50		0		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		4		
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	0	300	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0		650.000.000		0		650.000.000		0	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0	0	0	3	650.000.000	0	0	3	650.000.000	0	0	
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0		0		967.112.514		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	0	0	0	0	5	967.112.514	0	0	0	0
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				14.826.742.000		14.984.509.420		14.826.742.000		14.826.742.000		14.826.742.000
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	20	14.826.742.000	20	14.984.509.420	20	14.826.742.000	20	14.826.742.000	20	14.826.742.000
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0		0		0		0		640.598.989
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	640.598.989
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				650.000.000		0		0		0		650.000.000
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	70	650.000.000	0	0	0	0	0	0	50	650.000.000
1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				0		0		0		478.051.059		0
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	50	478.051.059	0	0
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				200.000.000		1.500.000.000		750.000.000		1.500.000.000		750.000.000
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	2	2	200.000.000	2	1.500.000.000	3	750.000.000	3	1.500.000.000	3	750.000.000
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		1.500.000.000		750.000.000		1.500.000.000		750.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	200.000.000	0	1.500.000.000	0	750.000.000	0	1.500.000.000	3	750.000.000
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0	2		10		0		10		0	
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	0	0		0		5		0		0	
1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0		0		750.000.000		0		0
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	0	0	0	0	0	5	750.000.000	0	0	0	0
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0		0		0		0		750.000.000
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	750.000.000
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				200.000.000		1.500.000.000		0		1.500.000.000		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0	2	200.000.000	10	1.500.000.000	0	0	10	1.500.000.000	0	0
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.057.725.000		5.108.302.250		5.159.385.272		5.210.979.125		5.263.088.916
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	82,59	84,59	5.057.725.000	85,49	5.108.302.250	86,39	5.159.385.272	87,29	5.210.979.125	88,19	5.263.088.916
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.057.725.000		5.108.302.250		5.159.385.272		5.210.979.125		5.263.088.916
Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	0	0	5.057.725.000	0	5.108.302.250	0	5.159.385.272	0	5.210.979.125	0	5.263.088.916
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		2		0	
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit)											
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M <sup>3</sup> /Hari)	0	0		0		0		0		0	
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)											
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)											
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)											
1.03.05.2.01.0018 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu				0		0		0		0		0
Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit)			0		0		0		0		0
1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0		0		0		0		0
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)			0		0		0		0		0
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				0		0		0		0		0
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)			0		0		0		0		0
1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				4.407.725.000		4.458.302.250		4.509.385.272		4.560.979.125		4.613.088.916
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)			4.407.725.000		4.458.302.250		4.509.385.272		4.560.979.125		4.613.088.916
1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0		0		0		0		0	
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M <sup>3</sup> /Hari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				0		0		0		0		0	
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
<b>1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>				<b>3.500.000.000</b>		<b>3.640.000.000</b>		<b>3.785.600.000</b>		<b>3.937.024.000</b>		<b>4.094.504.960</b>	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	82,59	84,59	3.500.000.000	85,49	3.640.000.000	86,39	3.785.600.000	87,29	3.937.024.000	88,19	4.094.504.960	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.500.000.000		3.640.000.000		3.785.600.000		3.937.024.000		4.094.504.960	
Terlaksanannya kegiatan Pengelolaan, sistem, Pembangunan, Pemeliharaan Darainase	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	0		3.500.000.000	0	3.640.000.000	0	3.785.600.000	0	3.937.024.000	1	4.094.504.960	
	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0		0		0		1		0		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0		0		1		0		0		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0		0		0		0		1		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0		0		0		0		1		
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	0	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	0	0		300		0		400		0		0
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	0	1.500	3.500.000.000	1.500	3.500.000.000	1.500	3.500.000.000	1.500	3.500.000.000	1.500	3.500.000.000	
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				0		140.000.000		0		237.024.000		0	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	0	0	0	300	140.000.000	0	0	400	237.024.000	0	0	
1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				0		0		0		200.000.000		0	
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	
1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan				0		0		0		0		194.504.960	
Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	194.504.960	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.06.2.01.0025 - Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				0		0		0		0		200.000.000
Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				0		0		0		0		200.000.000
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				0		0		285.600.000		0		0
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	0	0	0	1	285.600.000	0	0	0	0
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				0		0		100.000.000		0		0
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0
1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		0		100.000.000		0		0
Terselenggaranya infrastruktur permukiman dikawasan strategis	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	0	0		0		15		0		0	
1.03.07.2.01.0015 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Ton/hari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.07.2.01.0033 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				0		0		100.000.000		0		0
Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	0	0	0	0	0	15	100.000.000	0	0	0	0
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				150.000.000		156.000.000		13.162.240.000		15.688.729.600		9.316.278.784
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	85,66	86,66	150.000.000	87,16	156.000.000	87,66	13.162.240.000	88,16	15.688.729.600	88,66	9.316.278.784
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				150.000.000		156.000.000		13.162.240.000		15.688.729.600		9.316.278.784
Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	0	0	150.000.000	0	156.000.000	2	13.162.240.000	2	15.688.729.600	0	9.316.278.784

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	0	20		20		20		20		20		
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		1		1		2		
1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000.000		10.000.000.000			0
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	0	0	0	0	0	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	0		0
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		0		3.012.240.000		5.538.729.600			9.166.278.784
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	3.012.240.000	1	5.538.729.600	2		9.166.278.784
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				150.000.000		156.000.000		150.000.000		150.000.000			150.000.000
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	0	20	150.000.000	20	156.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20		150.000.000
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				0		0		0		100.000.000			0
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0		0
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		100.000.000			0
Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)			0		0		0		100.000.000			0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		100.000.000		0
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)			0		0		0		100.000.000		0
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				29.487.262.642		31.361.478.416		32.615.937.552		39.920.575.055		50.084.171.202
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	31,65	33,15	29.487.262.642	34,65	31.361.478.416	36,15	32.615.937.552	37,65	39.920.575.055	39,15	50.084.171.202
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				29.487.262.642		31.361.478.416		32.615.937.552		39.920.575.055		50.084.171.202
Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Jalan dan jembatan Kabupaten	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	500	500	29.487.262.642	500	31.361.478.416	500	32.615.937.552	500	39.920.575.055	500	50.084.171.202
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	4	4		4		4		4		4	
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	5	5		5		5		5		5	
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	4	4		4		4		4		4	
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	3,89	3,89		4,23		4,46		5,79		7,63	
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0,13	0,13		0,13		0,13		0,13		0,13	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1	1		1		1		1		1	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0,8	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0,17	0,17		0,17		0,17		0,17		0,17	
	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	4	4		4		4		4		4	
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	8	8		8		8		8		8	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	10	10		10		10		10		10	
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	5	5		5		5		5		5	
	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	5	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	500	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0,17	0,17	1.000.000.000	0,17	1.000.000.000	0,17	1.000.000.000	0,17	1.000.000.000	0,17	1.000.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0,13	0,13	500.000.000	0,13	500.000.000	0,13	500.000.000	0,13	500.000.000	0,13	500.000.000
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0,8	0,8	1.600.000.000	0,8	1.600.000.000	0,8	1.600.000.000	0,8	1.600.000.000	0,8	1.600.000.000
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	5	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				21.387.262.642		23.261.478.416		24.515.937.552		31.820.575.055		41.984.171.202
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	3,89	3,89	21.387.262.642	4,23	23.261.478.416	4,46	24.515.937.552	5,79	31.820.575.055	7,63	41.984.171.202
1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
Terawasnya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	8	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				45.000.000		45.450.000		45.904.500		46.363.545		46.827.180
Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	90	95	45.000.000	97	45.450.000	100	45.904.500	100	46.363.545	100	46.827.180
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja jasa Konstruksi yang bersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		15.450.000		15.904.500		16.363.545		16.827.180
Terseleenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.450.000	1	15.904.500	1	16.363.545	1	16.827.180
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				15.000.000		15.450.000		15.904.500		16.363.545		16.827.180
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.450.000	1	15.904.500	1	16.363.545	1	16.827.180
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				175.000.000		189.000.000		196.560.000		204.422.400		212.599.296

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	90	90	175.000.000	100	189.000.000	100	196.560.000	100	204.422.400	100	212.599.296
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0			
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1			
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		74.000.000		81.560.000		89.422.400		97.599.296
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Ruang Daerah Kabupaten Bengkayang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	60	60.000.000	65	74.000.000	70	81.560.000	75	89.422.400	80	97.599.296
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				60.000.000		74.000.000		81.560.000		89.422.400		97.599.296
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	60	60.000.000	65	74.000.000	70	81.560.000	75	89.422.400	80	97.599.296
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				0		0		0		0		0
Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				0		0		0		0		0
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				0		0		0		0		0
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bengkayang, September 2025  
Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang

**MARTINUS PONES, ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661112 200003 1 004

**DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai 1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
3.	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
4.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
5.	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
6.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan 1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
7.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	

Bengkayang, September 2025  
Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang

**MARTINUS PONES. ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661112 200003 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
1	Ketaatan Terhadap RTRW	%	84,09	90	100	100	100	100	100
2	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis	%	86,66	95,33	100	100	100	100	100
3	Kapasitas Air Baku Kabupaten	Liter/Detik	1729,5	1744,5	1759,5	1774,5	1789,5	1804,5	1819,5
4	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Angka	31,65	31,65	32,65	33,65	34,65	35,65	36,65
5	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
6	Predikat Nilai Sakip	Kategori	B	B	B	B	B	B	B
7	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Angka	0,21	0,83	2,03	2,41	2,79	3,17	3,53
8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
9	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	82,79	83,69	84,59	85,49	86,39	87,29	88,19
10	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi	Unit	2	3	3	3	4	4	4

Bengkayang, September 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

**INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Indeks Infrastruktur	positif	Angka	56,73	58,66	59,26	59,93	60,65	61,44	62,28
2	Ketaatan Terhadap RTRW	komulatif	%	84,09	90	100	100	100	100	100
3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman	komulatif	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
4	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	komulatif	Angka	31,65	31,65	32,65	33,65	34,65	35,65	36,65
5	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	komulatif	Angka	0,21	0,83	2,03	2,41	2,79	3,17	3,53
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman	komulatif	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
7	Luas wilayah produksi	positif	Ha	312.281,53	312.281,53	312.281,53	312.481,53	312.481,53	312.581,53	312.581,53
8	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	positif	%	82,79	83,69	84,59	85,49	86,39	87,29	88,19
9	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	positif	KM	260,51	260,51	268,74	276,97	285,2	293,43	301,66
10	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	positif	%	80	80	80	80,7	80,7	81,48	81,48
11	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	positif	%	44,13	44,61	45,11	45,61	46,11	46,61	47,11
12	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	komulatif	%	31,65	31,65	33,15	34,65	36,15	37,65	39,15
13	Proporsi Panjang Jembatan Kayu dalam kondisi baik dan sedang	positif	Unit	60	60	60	62	64	66	68
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	positif	%	59,4	60,72	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72
15	Rasio jaringan irigasi	positif	%	0,56	0,83	1,24	1,66	2,07	2,48	2,9
16	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	komulatif	%	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
17	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	komulatif	Kategori	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
18	Persentase Penduduk berakses Air minum	positif	%	59,4	68,59	69,79	70,99	72,19	73,39	74,59
19	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	positif	Unit	25	25	25	26	26	27	27
20	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	positif	Orang	203.003	203.003	206.555	210.106	213.658	217.209	220.761

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	positif	Orang	187.998	187.998	189.477	190.957	192.437	193.917	195.397
22	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	positif	Ha	2.275,06	2.275,06	2.246,29	2.251,47	2.268,32	2.297,54	2.338,81
23	Luas wilayah industri	positif	Ha	200	200	200	200	250	300	450
24	Luas wilayah perkotaan	positif	Ha	25.242	25.242	25.242	25.242,43	25.342,43	25.342,43	25.442,43

Bengkayang, September 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

